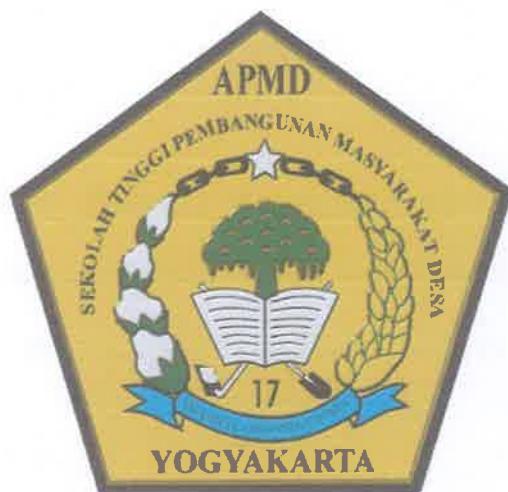


SKRIPSI

PELEMBAGAAN LUMBUNG MATARAMAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KALURAHAN KEDUNGPOH KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Dilihat Dari Peran Pemerintah Kalurahan dan Partisipasi Kelompok Tani)



Disusun Oleh:

SEAN ANDREAS U.P SABAORA

19520032

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2024



HALAMAN JUDUL

PELEMBAGAAN LUMBUNG MATARAMAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KALURAHAN KEDUNGPOH KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Dilihat dari Peran Pemerintah Kalurahan dan Partisipasi Kelompok Tani)



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

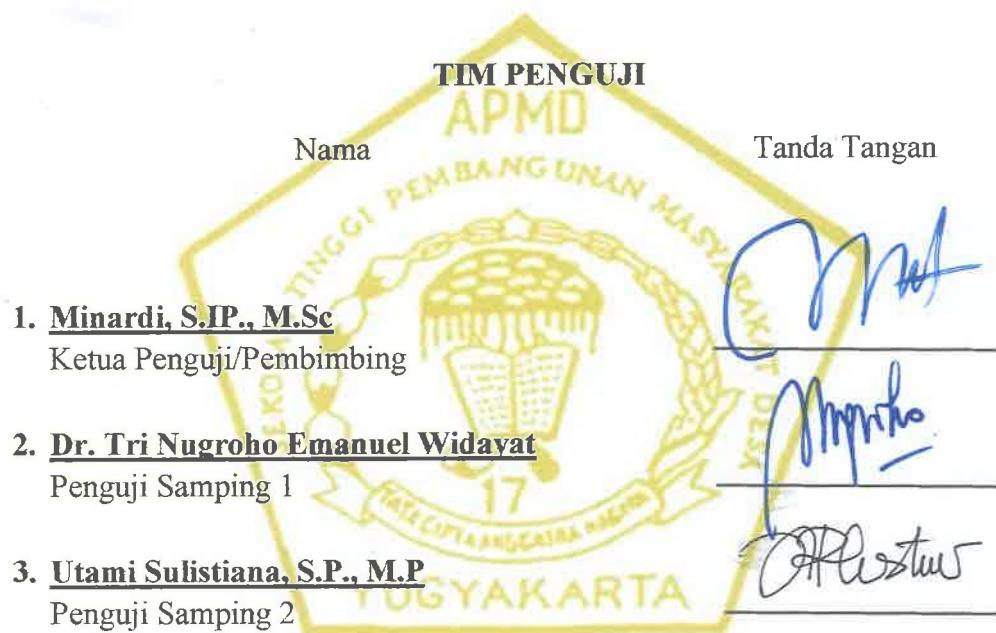
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juli 2024

Waktu : 10.00 s/d 11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui,



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SEAN ANDREAS U.P SABAORA

Nim : 19520032

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELEMBAGAAN LUMBUNG MATARAMAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KALURAHAN KEDUNGPOH KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Dilihat dari Peran Pemerintah Kalurahan dan Partisipasi Kelompok Tani)”** yang berpenelitian di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Juli 2024


SEAN AND BCE03ALX259268081 ORA

19520032

MOTTO

“Jangan pertaruhkan dunia dan hilangkan jiwamu, kebebasan lebih baik daripada perak atau emas”.

(Bob Marley)

“Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi”.

(Tan Malaka)

“Membenci artinya menolak mengerti. Itulah tindakan paling dungu”.

(Rocky Gerung)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa bersyukur, bangga dan cinta yang tulus kepada orang-orang terkasih yang telah mendukung penulis dengan caranya masing-masing:

1. Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena berkat, kebaikan, anugerah dan kasih setia-Nya dalam hidup penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Adri U. R. Sabaora dan Ibu Yulianthy Nainggolan. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta kasih dan dukungan yang diberikan selama ini hingga saya dapat menyelesaikan studi. Semoga bapak dan mama sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
3. Kakek An. P. Sabaora dan Nenek Rambu Eda Ngana, Opung Tabitha Edy Pramiati dan Alm. Opung O. G. Nainggolan. Terimakasih atas kasih sayang, doa dan dukungannya selama ini.
4. Bapak Yosua Umbu Osa Sabaora dan Ibu Veronica Rambu Nguju, Om Yulius Kura dan Tante Erly Rambu Liwa Sabaora, Om Umbu Sunga Pajukan dan Tante Ria Rambu Atarabu Sabaora, Om Yules Umbu Hamba Pulu dan Tante Shinta Rambu Yaku Anahida Sabaora, Bapak David Umbu Joka Sabaora dan Ibu Heldagarda Rambu Padu Leba, dan Ibu Maretgarethan Nainggolan, Tulang Bonar Bona Tua Nainggolan, dan Tulang Viktor Marhuaso Nainggolan. Terimakasih atas doa dan dukungannya terhadap saya selama masa menempuh studi hingga saat ini.
5. Untuk adik-adik ku tercinta Umbu Riada Tagumara Sabaora, Wiliam Gracia Umbu Hama Sabaora dan Sacha Andrea Rambu Hory Sabaora,

Sepupu Petra, Rena, Galda, Gildon, Giraya Alice, Ozin, Clara, Brendy, Neil, Inya, Yabu dan Jhon. Terima kasih sudah memberi dukungan dan doa dalam proses menempuh pendidikan selama ini. Semoga kita selalu akur dan kompak sebagai saudara serta sukses bersama.

6. Untuk sahabatku Rusdi Tarambani, Umbu Kanda, Om Antoni, Akwan Boka, Ando Scooby, Andri Bule, Dicky Escobar, Rian Rajang, Arland Ucu, Davit Ucil, Yosef Tiba, Isnaldy Umbu, Era Anak, Hutri Goyi dan Rambu Ketty . Terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini, semoga kita bisa sukses bersama kedepannya.
7. Kepada teman-teman Pak Udho, Chaya, Bang Leke, Maha Katti, Shinta, Una, Alvin, Yandy, Yanda, Ella, Try, Make, Umbu Tamu, Yepsy Kici, Nando Bangto, Umbu Saki, Elsavan, Derivat, Crispin, Resa Monte, Yunus Pangjur, Vinus, Erik Tamu, Umbu Ronjot, Dicky, Umbu Hadanga, Umbu Hapu,_Rydwan, Arwin, Aldo, Adrian, Intan, Rany, Anggel Maharani, Ina, Gita, Putri, Claudia, Karsa Setiawati, Riny, Alma, Vijay, Mulyadil dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Terima kasih karena selalu menyemangati dan menjadi orang baik dalam hidup saya selama ini.
8. Kepada Organisasi Perwasus Salatiga, Serikat Mahasiswa Indonesia Cabang Yogyakarta, Gilarumarada Yogyakarta dan Sumba AMPD Terima Kasih karena sudah menjadi wadah sebagai tempat saya belajar dan merasakan suasana kekeluargaan selama di tanah rantauan.
9. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. Terima kasih karena sudah menjadi tempat menimba ilmu dalam memperkaya pengetahuan akademik saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “PELEMBAGAAN LUMBUNG MATARAMAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN (Dilihat Dari Peran Pemerintah Kalurahan dan Partisipasi Kelompok Tani)” yang dilakukan di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Sehingga skripsi ini dapat menjadi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi referensi, penghimpunan data maupun kesimpulan, sehingga harapannya dapat disempurnakan oleh peneliti lain pada kemudian hari. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang mendukung hingga selesaiya skripsi ini dengan baik. Karena itu, penulis hendak mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya selama masa studi.
2. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk belajar dan memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman akademik.
3. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Desa “APMD” Yogyakarta.
5. Bapak Minardi, S.IP., M.Sc selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam proses penggerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
6. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku dosen penguji satu. Terima kasih atas koreksi, evaluasi dan sarannya guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P selaku dosen penguji dua. Terima kasih atas masukan dan sarannya untuk perbaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta segenap karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu dan pelayanannya selama penulis menempuh studi di kampus tercinta ini.
9. Kepada Perangkat Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terimakasih karena sudah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di Kalurahan Kedungpoh guna menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada Bapak Ruslan Mudzakir, Kolib Nurhidin, Didik Purnomo, Iwan Suswanto, Julius Giri, Ibu Heni Putriani dan Suyanti selaku informan dalam penelitian ini. Terima kasih karena sudah memberikan informasi dan pandangannya yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh data dalam proses penggerjaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR BAGAN | xii |
| INTISARI | xiii |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Fokus Penelitian..... | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 9 |
| F. <i>Literature Review</i> | 10 |
| G. Kerangka Konsep | 18 |
| 1. Pelembagaan Lumbung Mataraman..... | 18 |
| 2. Ketahanan Pangan | 23 |
| 3. Pemerintah Kalurahan/Desa | 28 |
| 4. Partisipasi Masyarakat..... | 34 |
| H. Metode Penelitian | 41 |
| 1. Jenis Penelitian | 41 |
| 2. Unit Analisis..... | 42 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| 4. Teknik Analisis Data | 47 |
| BAB II PROFIL KALURAHAN KEDUNGPOH, KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA... | 49 |
| A. Sejarah..... | 49 |
| B. Kondisi Geografis | 52 |
| C. Kondisi Demografis | 53 |
| 1. Data Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah Padukuhan | 53 |
| 2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 54 |
| 3. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan..... | 56 |

| | |
|--|------------|
| 4. Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur | 58 |
| 5. Data Penduduk Berdasarkan Agama..... | 59 |
| D. Ekonomi dan Potensi Desa | 60 |
| 1. Pasar Gojo | 60 |
| 2. Kelompok Wanita Tani (KWT) | 60 |
| 3. Pariwisata Kalurahan..... | 61 |
| 4. Lumbung Mataraman | 62 |
| E. Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan | 63 |
| 1. Pemerintah Kalurahan Kedungpoh | 63 |
| 2. Badan Permusyawaratan Kalurahan..... | 67 |
| 3. Badan Usaha Milik Kalurahan | 68 |
| 4. Lembaga Kemasyarakat Kalurahan..... | 69 |
| BAB III PELEMBAGAAN LUMBUNG MATARAMAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KALURAHAN KEDUNGPOH..... | 70 |
| A. Pelembagaan Lumbung Mataraman..... | 70 |
| 1. Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Lumbung Mataraman | 70 |
| 2. Sistem Pengelolaan Lumbung Mataraman..... | 74 |
| 3. Pogram Pengembangan Lumbung Mataraman | 83 |
| 4. Partisipasi Kelompok Tani | 92 |
| B. Upaya Mewujudkan Katahanan Pangan Lokal..... | 100 |
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat..... | 107 |
| 1. Faktor Pendukung | 107 |
| 2. Faktor Penghambat..... | 110 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 115 |
| A. Kesimpulan | 115 |
| B. Saran | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA | 120 |
| LAMPIRAN | 123 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1. Daftar Informan Penelitian..... | 43 |
| Tabel 2.1. Data Penduduk Berdasarkan Wilayah Padukuhan..... | 53 |
| Tabel 2.2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 54 |
| Tabel 2.3. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan..... | 56 |
| Tabel 2.4. Data Penduduk Berdasarkan Umur..... | 58 |
| Tabel 2.5. Data Penduduk Berdasarkan Agama..... | 59 |
| Tabel 2.6. Daftar Perangkat Kalurahan Kedungpoh..... | 66 |
| Tabel 2.7. Daftar Pengurus Badan Permusyawaratan Kalurahan..... | 67 |
| Tabel 2.8. Daftar Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan..... | 68 |
| Tabel 2.9. Daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan..... | 69 |

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Struktur Pemerintah Kalurahan Kedungpoh.....65

INTISARI

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan peran pemerintah Kalurahan dan partisipasi kelompok tani dalam proses pengelolaan Lumbung Mataraman dan dampaknya terhadap pemenuhan pangan lokal di Kalurahan Kedungpoh. Di mana dalam konteks pengelolaannya yaitu melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT), tetapi partisipasi mereka belum maksimal dan masih minimnya peran pemerintah Kalurahan dalam mengorganisasikan KWT. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Pelembagaan Lumbung Mataraman Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul”?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki, menjangkau informasi faktual dan menggambarkan perihal proses pelembagaan Lumbung Mataraman dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kalurahan Kedungpoh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data dan informasi yang telah peneliti himpun kemudian dianalisis dengan menggunakan sistem reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelembagaan Lumbung Mataraman yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Kedungpoh sudah berjalan semenjak akhir tahun 2023 hingga saat ini. Proses Pelembagaan Lumbung Mataraman dapat dilihat melalui: 1) proses pengelolaan lumbung yang melibatkan Perangkat Kalurahan dan KWT; 2) pengembangan sistem pertanian terpadu yang meliputi sektor pertanian, peternakan dan perikanan; 3) mengatur sistem pengelolaan keuangan dan modal usaha, produksi, distribusi dan bagi hasil di dalam lumbung; 4) pembagian lahan kelola bagi KWT, Perangkat Kalurahan dan untuk Lumbung Mataraman itu sendiri; dan 5) produksi tanaman pangan hortikultura jenis sayur-mayur dan buah-buahan, pembibitan dan budidaya ikan nila dan wader pari, serta produksi pupuk organik dari kotoran ternak sapi di dalam Lumbung Mataraman. Di mana hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pelembagaan Lumbung mataraman di Kalurahan Kedungpoh. Namun dalam perkembangannya, masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan Lumbung Mataraman yaitu meliputi: masih kurangnya partisipasi aktif anggota KWT dari setiap Padukuhan dan beberapa KWT juga masih pasif; minimnya peran pemerintah Kalurahan dalam melakukan pembinaan dan memotivasi masyarakat khususnya anggota KWT agar terlibat aktif di dalam lumbung; dan ketersediaan air di dalam lumbung yang masih kurang maksimal. Selain itu, dampaknya terhadap ketahanan pangan lokal juga belum signifikan, karena masih dalam proses pengembangan awal, di mana produksi pangan dan lahan yang dikelola juga masih terbatas. Sehingga semua ini harus menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah Kalurahan Kedungpoh dan pengelola lumbung dalam mengatasi hambatan dan kendala yang ada guna pengembangan Lumbung Mataraman lebih lanjut kedepannya.

Kata Kunci: Pelembagaan, Lumbung Mataraman, Ketahanan Pangan, Pemerintah Desa/Kalurahan, Partisipasi, Kelompok Tani.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), secara praktik terus berupaya mendorong kemandirian Desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritasnya. Dengan adanya UU Desa, kini Desa telah memiliki hak otonom dan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri sesuai dengan prakarsa masyarakat maupun hak asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, maka pemerintah Desa memiliki peran yang sangat menentukan dalam proses pembangunan Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Salah satu peran pemerintah Desa yaitu berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat kebijakan pembangunan berskala lokal Desa, yang kemudian disesuaikan dengan potensi Desa dan kepentingan masyarakat setempat. Pada pasal 78 dalam UU Desa, menyebutkan bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka yang menjadi perhatian peneliti pada konteks ini yaitu berkaitan dengan proses

“Pelembagaan Lumbung Mataraman” di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam hal ini, Lumbung Mataraman tersebut dapat diartikan sebagai suatu kebijakan atau program pembangunan di Desa, tentu saja berorientasi pada tujuan pembangunan Desa seperti yang telah disebutkan di atas, terutama yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Artinya, hasil dari Lumbung Mataram tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dituturkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menekankan bahwa pengembangan Lumbung Mataraman diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru serta mencetak petani milenial; karena hasil dari Lumbung Mataraman dapat dikonsumsi sendiri, dijual, diolah dan dikembangkan oleh masyarakat setempat (liputan6.com, 06/12/2023. Diakses pada 21/02/2024.)

Untuk diketahui, Lumbung Mataraman adalah salah satu program dari pemerintah Provinsi DIY dengan menggunakan Dana Keistimewaan (Danais), yang kemudian dialokasikan pada beberapa Kalurahan di DIY. Salah satu Kalurahan yang menerima program tersebut yaitu Kalurahan Kedungpoh yang terletak di Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Pada prinsipnya, program Lumbung Matraman tersebut merupakan program yang bertujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui ketahanan pangan lokal. Namun, program yang digagas oleh pemerintah Provinsi DIY guna mendorong kemandirian pangan masyarakat ini hanya diperuntukkan

bagi Kalurahan yang memang sudah siap dan dirasa mampu untuk mengembangkan konsep Lumbung Mataraman tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh, yakni: “Sejak awal memang kita pilih Kalurahan mana yang sudah siap menjalankan Lumbung Mataraman. Karena kalau sudah terpilih, maka harus mau menjalankannya. Saya tidak mau ada lagi kasus pengembalian dana (Danais) karena Kalurahan pada kenyataannya tidak siap. Jadi kalau Kalurahan mau menerima program ini, maka harus siap dulu. Jika sudah siap silahkan ajukan” (jogjaprov.go.id, 04/12/2023. Diakses pada 21/02/2024).

Dari pemaparan di atas, Sri Sultan H.B X menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan program Lumbung Mataraman, maka Kalurahan sasaran program harus memiliki kesiapan yang matang. Kesiapan Kalurahan yang dimaksudkan dalam hal ini terutama berkaitan dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kalurahan itu sendiri. Maka pada konteks inilah peran pemerintah Kalurahan sangat penting. Karena Lurah dan perangkat Kalurahan merupakan pihak yang paling mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada di wilayahnya untuk dikembangkan melalui program Lumbung Mataraman. Selain itu, peran penting pemerintah Kalurahan juga terletak pada kewenangannya dalam menentukan apakah wilayahnya akan diusulkan atau tidak diusulkan sebagai penerima program Lumbung Mataraman tersebut. Disamping itu, pemerintah Kalurahan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas penggunaan Danais dan sukses atau tidaknya realisasi pengembangan program Lumbung Mataraman.

Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta diresmikan langsung oleh Sri Sultan Hameng Buwono X selaku Gubernur DIY pada Senin (04/12/23). Adapun besaran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) yang digelontorkan oleh Pemprov DIY untuk pengembangan program Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh yaitu sebesar Rp. 750.000.000 (desakedungpoh.gunungkidulkab, 06/12/2023. Diakses pada 21/02/2024). Tentu saja, Danais tersebut menjadi modal awal bagi pemerintah Kalurahan Kedungpoh dalam mengembangkan program Lumbung Mataraman. Selain itu, pemerintah Kalurahan Kedungpoh juga telah menyediakan lahan untuk Lumbung Mataraman seluas 20.000 meter persegi atau setara dengan 2 hektare. Jika dilihat dari luasan lahan pertanian tersebut, tampaknya hal ini sudah sangat cukup untuk pengembangan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh.

Lebih lanjut, adapun alasan yang mendasari Kalurahan Kedungpoh terlibat dalam program Lumbung Mataraman yaitu untuk mendapatkan bantuan modal dari pemerintah Provinsi DIY, dimana modal yang didapatkan tersebut akan digunakan untuk mengeksplorasi sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan lokal setempat. Selain itu, dengan adanya program Lumbung Mataraman tersebut juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat petani, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Artinya, hal ini akan menjadi terobosan baru bagi Kalurahan Kedungpoh guna meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat

setempat. Sebab, selama ini sektor pertanian di Kalurahan Kedungpoh sangat terbatas hasilnya, dikarenakan kondisi geografis di Kabupaten Gunungkidul yang secara umum bersifat pegunungan bebatuan, kering atau tandus dan minim akan ketersediaan air. Sehingga dengan adanya program Lumbung Mataraman tersebut, maka diharapkan dapat mengatasi masalah ketersediaan pangan di Kalurahan Kedungpoh, dengan memanfaatkan lahan pertanian yang ada dan bantuan anggaran yang telah didapatkan dari pemerintah provinsi DIY.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa pengembangan program Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh menggunakan pendekatan pertanian terpadu, mulai dari pembibitan 20 varietas anggur, budidaya melon, markisa, aneka sayuran, tanaman cabai dan bawang merah. Secara umum, tanaman pangan yang dikembangkan melalui konsep Lumbung Mataraman ini merupakan jenis tanaman hortikultura. Jika dilihat dari berbagai jenis tanaman pangan—terutama tanaman sayuran dan buah—yang dikembangkan di dalam Lumbung Mataraman tersebut, tentu saja semua ini tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan pangan semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Sebab, sayur dan buah merupakan makanan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena keduanya mengandung zat gizi tertentu sehingga harus selalu dikonsumsi setiap kali makan.

Oleh karenanya, tingkat kebutuhan warga terhadap tanaman pangan, khususnya sayuran tidak akan pernah ada hentinya dan akan terus dibutuhkan setiap kali makan. Sehingga dengan adanya Lumbung Mataraman yang juga

membudidayakan berbagai jenis tanaman sayuran, maka hal ini akan sangat membantu warga setempat dalam memenuhi kebutuhan dapurnya. Bahkan jika hasilnya lebih, karena semua orang juga membutuhkan sayur maupun buah, maka hasil dari Lumbung Mataraman tersebut dapat pula dijual ke masyarakat luas guna menambah pendapatan asli Kalurahan dan masyarakat setempat. Menurut peneliti, hal inilah yang membuat program Lumbung Mataraman menjadi strategis dan sangat berpotensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Namun untuk saat ini, capaian hasil pertanian dari Lumbung Mataraman masih terbilang stagnan dan belum masif. Hal ini dikarenakan bahwa program Lumbung Mataraman tersebut masih dalam tahapan pengembangan awal (pembibitan, menanam dan merawat tanaman yang ada). Adapun hasil dari beberapa tanaman yang sudah dipanen saat ini hanya untuk dikonsumsi oleh masyarakat setempat, belum sampai pada tahap pemasaran dan penjualan keluar.

Kemudian untuk proses pengelolaannya, Lumbung Mataraman dikelola secara swadaya oleh petani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat. Sedangkan pemerintah Kalurahan hanya mengontrol, mengevaluasi dan memfasilitasi akan jalannya program tersebut. Namun, dalam temuan observasi peneliti, belum menemukan adanya signifikansi peran dari pemerintah Kalurahan Kedungpoh untuk meningkatkan partisipasi KWT dalam pengelolaan Lumbung Mataraman. Hal ini dilihat dari masih minimnya partisipasi KWT dari setiap Padukuhan di Kalurahan Kedungpoh dalam proses pengembangan program Lumbung Mataraman tersebut. Padahal, Kalurahan Kedungpoh memiliki 10 Padukuhan, dimana setiap Padukuhan

tersebut memiliki Kelompok Wanita Tani (KWT) masing-masing. Tetapi berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, menunjukkan bahwa hanya terdapat tiga Padukuhan saja yang KWT-nya masih aktif, sedangkan KWT dari Padukuhan lainnya masih terlihat vakum atau tidak aktif. Pada konteks ini, peneliti melihat bahwa minimnya partisipasi KWT dalam realisasi program Lumbung Mataraman ini juga tidak terlepas dari minimnya peran pemerintah Kalurahan itu sendiri dalam mensosialisasikan program, mengorganisasikan dan memotivasi masyarakat setempat untuk menyukseskan program Lumbung Mataraman tersebut.

Berangkat dari uraian di atas, peran pemerintah Kalurahan dalam pelembagaan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Sebab, tanpa adanya proses pelembagaan Lumbung Mataraman, maka program ketahanan pangan akan sulit dikembangkan secara signifikan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan proses “Pelembagaan Lumbung Mataraman Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul” yang ditinjau dari peran pemerintah Kalurahan dan partisipasi Kelompok Wanita Tani (KWT). Penelitian ini menggunakan salah satu dari perspektif 5G dalam Mazhab Timoho, yaitu “perspektif *Governance*”. Sebab, penelitian ini dalam banyak hal sesuai dengan perspektif *Governance* yang menekankan pada beberapa aspek seperti tata kelola pemerintahan, interaksi pemerintah dan non pemerintah, dan tipe-tipe pengelolaan pemerintah. Artinya, dalam hal pelembagaan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh, pemerintah

Kalurahan bukan merupakan pelaku tunggal, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* baik lintas institusi pemerintah maupun dengan lembaga/institusi yang non pemerintah. Sehingga semua ini sangat membutuhkan kemampuan manajemen atau tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Pelembagaan Lumbung Mataraman Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul”?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Pelembagaan Lumbung Mataraman
 - a. Peran Pemerintah Kalurahan/Desa Dalam Pengembangan Lumbung Mataraman
 - b. Sistem Pengelolaan Lumbung Mataraman
 - c. Program Pengembangan Lumbung Mataraman
 - d. Partisipasi Kelompok Tani
2. Upaya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Lokal
3. Faktor Pendukung dan Penghambat

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelembagaan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh yang dilihat dari peran pemerintah Kalurahan dan partisipasi kelompok tani.
2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dalam mewujudkankan ketahanan pangan lokal melalui pengembangan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh.
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelembagaan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengulas kondisi yang terjadi di lapangan secara objektif dengan pendekatan yang ilmiah guna perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, sehingga karya ini dapat pula dijadikan sebagai referensi untuk penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Selain untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD” Yogyakarta, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat umum, pemerintah Desa maupun praktisi dalam kaitannya

dengan proses pelembagaan program ketahanan pangan ditingkat Desa/Kalurahan.

F. Literature Review

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukan merupakan satu-satunya penelitian yang mengkaji tentang pelembagaan, ketahanan pangan, peran pemerintah Desa/Kalurahan dan partisipasi masyarakat. Namun banyak juga penelitian terdahulu yang telah membahas topik serupa. Oleh karenanya, pada kesempatan ini peneliti menghimpun, mempelajari, mengomparasikan dan mengelaborasikan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dan relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini guna memetakan persamaan dan perbedaannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam *literature review* ini yaitu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aditiawati., *et al* (2016) yang berjudul “Pengembangan Potensi Lokal di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional”. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep Desa Vokasi merupakan Desa yang dijadikan model pengembangan potensi lokal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Potensi lokal yang dikembangkan di Desa Panawangan berupa perikanan, peternakan, dan pertanian. Ketiga bidang tersebut dikembangkan dengan bioteknologi sederhana, contohnya budidaya ikan bawal organik. Dari penelitian ini diketahui bahwa luas seluruh kolam ikan mencapai 9.433,32 m² dan dimiliki oleh 30 orang petani. Pelatihan dan pendampingan diberikan oleh dosen dan mahasiswa SITH selama dua tahun. Produk yang dihasilkan

dipasarkan dengan strategi bisnis dan pengemasan yang menarik, dan juga bekerja sama dengan Agato (pemasok sayuran organik). Dari 7 Dusun yang diberikan pelatihan, saat ini telah berkembang dan diterapkan pada 8 Desa dan 3 kabupaten di luar Panawangan, yaitu Kabupaten Garut, Kadipaten dan Tasikmalaya. Berdasarkan hasil tersebut, pengembangan potensi Desa Panawangan sebagai model Desa Vokasi dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan potensi nasional cukup berhasil.

2. Kajian ilmiah yang dilakukan oleh Sari dan Zuber (2020) berjudul “Kearifan Lokal dalam Membangun Ketahanan Pangan Nasional”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kearifan lokal dalam sistem produksi pertanian dalam membangun ketahanan pangan petani di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem produksi pertanian yang dilakukan oleh petani merupakan hasil dari adaptasi lingkungan alam serta pengalaman bertani yang telah dilakukan bertahun- tahun lamanya. Melalui kearifan lokalnya, petani memiliki strategi-strategi yang dilakukan untuk membangun ketahanan pangan keluarga. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya adalah adanya kelompok tani sebagai wadah pemberdayaan petani dalam membahas masalah pertanian, sedangkan faktor penghambatnya adalah masalah ketersediaan air yang masih terbatas. Namun dengan kearifan lokalnya, petani di Desa Pacarejo dapat membangun ketahanan pangan keluarga.
3. Studi yang dilakukan oleh Sumanto dan Hamidah (2023) dengan judul “Tipe Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Pengelolaan

Lumbung Mataraman di Padukuhan Jamblangan Sleman”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji proses pengelolaan Lumbung Mataraman oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar dan mengkaji tipe partisipasi anggota KWT dalam pengelolaan Lumbung Mataraman di Padukuhan Jamblangan, Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Lumbung Mataraman meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan tipe partisipasi anggota KWT Mekar bersifat partisipasi fungsional, hal ini dapat dilihat dari adanya kelompok-kelompok kecil pada pengelolaan Lumbung Mataraman yaitu kelompok piket dan divisi kepengurusan yang terdiri dari pemasaran, pembibitan, pekarangan, demplot, dan humas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Pratiwi (2024) yang berjudul “Optimalisasi Penataan Lumbung Mataraman dalam Mendukung Kawasan Wisata Edukasi Terpadu Padukuhan Ngalian, Desa Widodomartani”. Dijelaskan bahwa Lumbung Mataraman merupakan program dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan. Program tersebut juga diarahkan untuk menjadi destinasi wisata alternatif sesuai dengan potensi wilayah. Lumbung Mataraman dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penataan Lumbung Mataraman bertujuan untuk mengatur tatanan lahan yang sesuai dengan peruntukannya dan

memperindah tampilan. Luaran yang dicapai berupa *site plan* Lumbung Mataraman KWT Mekar. Akan tetapi, penataan ulang Lumbung Mataraman tersebut tidak banyak merubah fungsi yang sudah ada, namun difokuskan kepada pemanfaatan potensi yang sudah ada secara maksimal dan menambah nilai estetika. Hasil dari penataan ini diharapkan dapat memaksimalkan fungsi Lumbung Mataraman sebagai penyedia kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung kawasan wisata edukasi terpadu yang sedang dibangun.

5. Kajian yang dilakukan oleh Aziza (2019) tentang “Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan”. Kajian ini memaparkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, baik dari sisi ketersediaan, kualitas, kelayakan, keragaman, dan kecukupan gizinya secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan kelembagaan yang kuat untuk menangani bidang pangan. Dalam peraturan perundangan pangan pun telah menyebutkan perlunya dibentuk suatu kelembagaan pangan yang memiliki cakupan kewenangan yang luas, hanya saja sampai sekarang kelembagaan yang dimaksud belum terimplementasi secara optimal. Kajian ini bertujuan untuk memberikan alternatif penguatan kepada lembaga pangan yang telah ada untuk lebih mengoptimalkan perannya. Hasil analisis dari kajian ini menunjukkan bahwa perlunya strategi penguatan peran kelembagaan pangan, yaitu: Harmonisasi Kebijakan dan Perencanaan Program antar Kelembagaan Pangan; Optimalisasi Sumber Daya; Penguatan Implementasi Program; Evaluasi dan Monitoring untuk perbaikan selanjutnya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Gorensa (2021) yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten”. Penelitian ini menerangkan bahwa Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan di tingkat Desa yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan pertanian di Desa. Pemberdayaan perempuan dapat berjalan apabila terjadinya proses pengorganisasian terdapat perempuan itu sendiri dan juga peran serta pemerintah Desa dalam memberikan akses dan kontrol terhadap sumber daya yang ada di Desa. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa upaya Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Bina Melati di Desa Kraguman dilakukan melalui pemberian pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Sejauh ini ada dua kendala yang dihadapi oleh Kelompok Wanita Tani Bina Melati di Desa Kraguman yaitu kesulitan untuk membagi waktu dan kesulitan untuk mendapatkan dana. Untuk mencari jalan keluar dari persoalannya, ada dua cara yang ditempuh oleh Kelompok Wanita Tani Bina Melati yaitu menggelar rapat rutin sekali sebulan dan menggelar konsultasi dengan Pemerintah Desa Kraguman. Sejauh ini produk yang dihasilkan oleh Kelompok Wanita Tani Bina Melati hanya untuk dikonsumsi oleh para anggota kelompok dan belum didistribusikan kepada masyarakat Desa Kraguman secara umum, mengingat produk yang dihasilkan masih relatif minim.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Irawati., *et al* (2023) dengan judul “Strategi Penguatan Peran Kelembagaan Desa dalam Peningkatan Ketahanan Pangan di Desa Kendalbulur Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Kabupaten Tulungagung berdasarkan indeks ketahanan pangan komposit termasuk dalam klasifikasi baik atau sangat tahan terhadap kerentanan. Namun masih terdapat permasalahan dalam kelembagaan Desa Kendalbulur, yaitu masih kurangnya sumber daya manusia di bidang pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kelembagaan Desa dalam mengelola ketahanan pangan dan strategi penguatan kelembagaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kelembagaan Desa dalam mengelola ketahanan pangan sangat penting. Lebih lanjut, strategi penguatan peran kelembagaan Desa Kendalbulur dalam meningkatkan ketahanan pangan yaitu *Rapid Growth Strategy*. Oleh karena itu Desa Kendalbulur perlu konsisten dalam mengimplementasikan regulasi dan dukungan kelembagaan yang ada guna peningkatan hasil pertanian dan budidaya perikanan. Disamping itu, perlu juga memaksimalkan pengelolaan potensi pertanian, perikanan, peternakan dan wisata.
8. Studi yang dilakukan oleh Ali dan Saputra (2020) yang bertopik “Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar”. Studi ini menerangkan bahwa pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintahan Desa

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pematang Johar tidak terlepas dari hasil kepemimpinan yang baik sehingga dapat mengelola dan mengatur sistem pemerintahan Desa yang baik. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan Desa yaitu melalui program e-Desa. Dalam perkembangannya, program ini telah terlaksana walaupun belum maksimal dikarenakan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan program e-Desa ini. Tetapi dengan adanya program ini, setidaknya telah membantu pemerintah Desa dalam melakukan pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan transparansi keuangan dan program pembangunan Desa. Disamping itu, program E-Desa juga telah mendorong sistem pelayanan yang berbasis digital, dimana masyarakat Desa setempat dapat mengakses berbagai format yang dibutuhkan untuk pengurusan KTP, KK, maupun yang berupa surat izin dan lain sebagainya secara online tanpa harus datang ke kantor Desa.

9. Kajian ilmiah yang dilakukan oleh Ratnasari., *et al* (2022) yang berjudul “Peran Pelembagaan dalam Program *One Village One Product* Melalui *Empowerment Masyarakat*”. Kajian ini membahas tentang proses pelembagaan program *One Village One Product* (OVOP) di Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan sebagai konsep pengembangan ekonomi yang mengarahkan suatu wilayah agar mampu menciptakan produk lokal berdasarkan potensi sumberdaya lokal dan

berdaya saing global. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan OVOP sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan untuk mengetahui model pelembagaan yang digunakan dalam pelaksanaan program OVOP. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) Proses pelaksanaan OVOP meliputi pemetaan potensi, menemukan sasaran pada basis Desa tertinggal, OVOP dikembangkan secara kelompok, menentukan potensi lokal, mengembangkan potensi lokal, menguatkan kelembagaan dengan konsep pemberdayaan dan membuat perencanaan usaha. 2) Model pelembagaan yang digunakan dalam pelaksanaan OVOP adalah kombinasi antara *bottom up* dan *top down*, meskipun belum memberikan dampak secara efektif. Untuk itu, program OVOP yang telah dilaksanakan memerlukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Berangkat dari *literature review* di atas, secara umum terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Adapun persamaannya yaitu terletak pada pembahasan mengenai: 1) Pentingnya program ketahanan pangan lokal bagi Desa guna terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Desa itu sendiri; 2) Pemerintah/pemerintah Desa/Kalurahan tidak hanya sekedar menjalankan kewenangannya, tetapi perlu juga mengembangkan berbagai inovasi guna menemukan pola pengembangan program ketahanan pangan yang tepat dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh Desa; dan 3) Mendorong adanya partisipasi masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.

Namun secara spesifik penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun perbedaan yang dimaksud yaitu meliputi: 1) Penelitian ini mengkaji terkait proses pelembagaan program Lumbung Mataraman yang tidak hanya dilihat dari segi pelaksanaannya, tetapi *novelty* dalam penelitian ini juga mencakup tahap perencanaan dan evaluasi serta pemanfaatan hasilnya dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal; 2) pengelolaan dan pengembangan program Lumbung Mataraman tidak hanya dilihat sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah Kalurahan/Desa semata, tetapi juga warga masyarakat setempat—terutama yang merupakan kelompok sasaran program—guna mengamati apakah ada atau tidaknya rasa kepemilikan bersama terhadap program tersebut; 3) Penelitian ini bermaksud untuk melihat peran pemerintah Kalurahan/Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga melihat bagaimana tingkat kesadaran, kesolidan dan kekompakan masyarakat itu sendiri dalam berpartisipasi; dan 4) Konteks ruang dan waktu penelitian juga mengandung karakteristik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti perbedaan kondisi geografis, potensi sumber daya yang dimiliki, kehidupan sosial budaya masyarakatnya, serta waktu penelitian yang mempengaruhi tingkat relevansi terhadap objek penelitian.

G. Kerangka Konsep

1. Pelembagaan Lumbung Mataraman

Pelembagaan berasal dari kata dasar “lembaga”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lembaga diartikan sebagai asal mula, bentuk, acuan, badan atau pola perilaku manusia. Sedangkan dalam

Ensiklopedi Bahasa Indonesia lembaga diartikan sebagai wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara terencana dan terorganisir, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Disamping itu, istilah lembaga juga diartikan sebagai suatu “institusi”, yang mana di dalamnya terdapat seperangkat nilai-nilai, norma-norma dan berbagai keyakinan, dan nilai-nilai yang bersifat nyata dan terpusat pada kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang (Natalia, 2022). Dengan demikian, lembaga dapat dimaknai sebagai pranata sosial dimana terdapat nilai-nilai, tujuan dan aturan main dalam setiap interaksi dan perilaku manusia yang terlembagakan di dalam sebuah organisasi.

Melembagakan berarti membuat jadi lembaga atau mengorganisasikan sebagai lembaga. Sedangkan cara atau proses untuk melembagakan pranata-pranata sosial yang ada disebut sebagai “pelembagaan”. Kata lain dari pelembagaan disebut sebagai “institusionalisasi” yang berarti proses dimana suatu kewajiban, norma, nilai, konsep, pikiran dan tindakan manusia serta aktualisasi sosial tertentu dibakukan agar memiliki daya mengikat (aturan main) bagi warga masyarakat (Soekanto, 2017). Oleh karenanya, istilah pelembagaan secara umum dimaknai sebagai proses pengembangan atau transformasi aturan dan prosedur yang mempengaruhi serangkaian interaksi manusia. Dalam laman Britannica.com, juga menyebutkan bahwa pelembagaan adalah proses yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat (yaitu perilaku supra-individu) dalam organisasi atau seluruh masyarakat.

Setidaknya terdapat tiga tindakan dalam proses pelembagaan, yaitu: 1) pembuatan atau pemasangan peraturan; 2) adaptasi peraturan, atau mengembangkan praktik baik; dan 3) perubahan peraturan, atau menggantikan peraturan lama dengan yang baru (<https://www.britannica.com/topic/institutionalization#ref338426>. Diakses pada 23/05/2024).

Dalam kaitannya dengan proses pelembagaan Lumbung Mataraman untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Konsep Lumbung Mataraman

Sesungguhnya Lumbung Mataraman adalah sebuah program, tetapi karena melahirkan program turunan di dalamnya, sehingga lebih tepatnya disebut sebagai konsep—yang berorientasi pada sektor pertanian dan pangan. Lumbung Mataraman digagas oleh pemerintah Daerah Provinsi DIY dengan tujuan untuk mendorong penguatan dan keberlanjutan ketahanan pangan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pemerintah Kalurahan/Desa. Sedangkan pengelolanya di lapangan adalah masyarakat petani setempat, khususnya oleh Kelompok Wanita Tani (KWT). Program ini sudah digagas sejak tahun 2017 dan hingga saat ini telah mencapai sekitar 50 titik Kalurahan sebagai tempat pengembangan Lumbung Mataraman di wilayah DIY.

Memang tidak ada semacam prosedur atau mekanisme yang dibakukan untuk pelaksanaan program ini. Tapi pada prinsipnya program ini tidak berlaku bagi semua Kalurahan/Desa yang ada di DIY, melainkan hanya bagi Kalurahan yang menyatakan diri siap dan mendapatkan persetujuan dari PemProv berdasarkan kriteria dan penilaian tertentu (jogjaprov.go.id, 04/12/2023. Diakses pada 23/05/2024). Namun kriteria tertentu yang dimaksudkan tersebut sebenarnya masih bersifat abstrak karena belum dibakukan sebagai prasyarat mutlak.

Dalam mekanismenya, Kalurahan yang merasa siap untuk mengembangkan program tersebut harus mengajukan diri terlebih dahulu, lalu kemudian diverifikasi oleh pihak PemProv untuk menentukan apakah Kalurahan tersebut layak atau tidak layak menerima program. Pada konteks ini PemProv DIY menjadi pihak penentu dan setiap Kalurahan yang ingin menerima program tersebut harus bergantung pada kebijaksanaan PemProv. Sebab, dalam hal ini Pemprov tidak hanya sekedar menyetujui usulan, tetapi juga mengalokasikan anggaran pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman. Kalurahan Kedungpoh, misalnya: setelah usulannya diterima, kemudian menerima dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) dari Pemprov DIY untuk pengembangan program Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh yaitu sebesar Rp. 750.000.000 ribu rupiah.

b. Tata kelola Kelembagaan Lumbung Mataraman

Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa keberadaan Lumbung Mataraman tidak lain adalah untuk penguatan ketahanan pangan lokal secara berkelanjutan. Dilain sisi, Lumbung Mataraman juga bertujuan untuk pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat Desa. Karena kaitannya dengan ketahanan pangan, secara umum program ini menitikberatkan pengelolaannya kepada masyarakat petani melalui kelompok-kelompok tani yang ada di setiap Padukuhan di suatu Kalurahan/Desa. Karenanya, partisipasi aktif anggota tani di setiap kelompok-kelompok tani menjadi sangat penting.

Disamping itu, karena Lumbung Mataraman merupakan program mandatoris dari PemProv DIY kepada pemerintah Kalurahan/Desa, maka peran kelembagaan pemerintah Kalurahan sangat dibutuhkan terutama dalam melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pelaksanaan program tersebut, agar diarahkan pada pencapaian tujuan, target dan manfaatnya bagi masyarakat setempat.

Oleh karenanya, peran pemerintah Kalurahan dan partisipasi aktif kelompok tani dalam pengelolaannya harus termanifestasikan secara konkret, signifikan dan berkelanjutan. Artinya, interaksi (relasi) kelembagaan antara pemerintah Kalurahan dengan kelompok tani yang ada di Kalurahan Kedungpoh harus bersifat kemitraan-fungsional, dimana kedua lembaga tersebut perlu berkolaborasi untuk

melembagakan program bersamanya yang berkaitan dengan Lumbung Mataraman. Namun dalam dinamikanya, justru tata kelola kelembagaan inilah yang nampaknya belum terpola dengan baik dalam proses pengelolaan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh. Dengan demikian, maka kolaborasi antara kedua lembaga tersebut perlu diarahkan pada upaya-upaya pengorganisasian program secara optimal, terstruktur dan sistematis.

Berangkat dari uraian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam upaya pelembagaan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh, diperlukan upaya-upaya lebih lanjut dalam tata kelola kelembagaan Lumbung Mataraman yang didasarkan pada: 1) peran kelembagaan pemerintah Kalurahan/Desa dalam penguatan partisipasi masyarakat melalui kelompok tani; 2) relasi dan kolaborasi antar kelembagaan pemerintah Kalurahan dan kelompok tani yang bersifat kemitraan-fungsional; 3) penataan dan pengorganisasian program yang terencana (memiliki tujuan dan target), terukur, terstruktur dan sistematis, serta partisipatif dan kolaboratif; dan 4) maksimalisasi potensi sumber daya yang ada guna mewujudkan ketahanan pangan lokal.

2. Ketahanan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada ketentuan umum dalam UU ini memaparkan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perairan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Ketahanan Pangan adalah suatu hal yang berkaitan dengan Pangan itu sendiri. Dalam hal ini, Ketahanan Pangan diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya unsur-unsur Pangan di dalamnya. Dengan kata lain, Ketahanan Pangan merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan konsumsi (makanan maupun minuman) manusia baik secara mutu dan gizinya. Selain itu, Ketahanan Pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan jumlah pangan dan gizinya yang dibutuhkan dalam konsumsi semata—tetapi lebih dari itu, yaitu mencakup ketersediaan, pengadaan, keterjangkauan, pemerataan dan proses pengolahan hasil pangan itu sendiri.

Menurut Kristiawan (2021) pangan merupakan aspek yang sangat penting bagi sektor pertanian, karena secara hirarki pangan merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar dalam pemenuhan aspirasi humanistik. Baginya, masalah konsumsi pangan dan pemenuhannya (Ketahanan Pangan) merupakan agenda penting dalam pembangunan

ekonomi di Indonesia. Sebab status (tingkat/peringkat) konsumsi pangan penduduk seringkali dipakai sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, krisis ketersediaan pangan akan menjadi isu yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik disuatu negara, termasuk Indonesia itu sendiri.

Organisasi Pangan dan Pertanian atau *Food and Agriculture Organization* (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana semua rumah tangga mempunya akses baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi kebutuhan seluruh keluarganya, dan dimana setiap rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan pangan tersebut (Kristiawan, 2021). Ini berarti bahwa konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan yang memadai, stabilitas dan akses terhadap unsur-unsur pangan utama—misalnya beras, sebagai salah satu unsur pangan pokok bagi mayoritas masyarakat Indonesia.

Dalam hal ketersediaan pangan yang memadai, berarti bahwa adanya pangan tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di suatu wilayah tertentu. Sementara stabilitas merujuk pada kemungkinan bahwa dalam kondisi sesulit apapun (misalnya pada musim paceklik), konsumsi terhadap pangan harus selalu terjaga dan kualitasnya tidak jatuh di bawah kebutuhan gizi yang dianjurkan. Sedangkan perihal akses pangan mengacu pada fakta bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami kelaparan atau kekurangan pangan karena ketiadaan sumber daya untuk memproduksi pangan, atau ketidakmampuan masyarakat untuk membeli pangan sesuai kebutuhannya.

Adapun definisi ketahanan pangan yang secara resmi disepakati oleh para pimpinan negara anggota PBB, termasuk Indonesia, pada *World Food Conference Human Right tahun 1933* dan *World Food Summit* tahun 1996, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu dalam jumlah dan mutu agar dapat hidup aktif dan sehat secara berkesinambungan sesuai dengan budaya setempat. Dengan demikian, maka sistem ketahanan pangan dapat dikatakan mantap apabila mampu memberikan jaminan bahwa semua penduduk setiap saat pasti memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan standar gizi untuk kehidupan yang sehat, tumbuh dan produktif. Oleh karena itu, ketahanan pangan ditentukan oleh tiga indikator kunci, yaitu ketersediaan pangan (*food availability*), jangkauan pangan (*food access*), dan kehandalan (*reliability*) dari ketersediaan maupun keterjangkauan pangan tersebut (FOA dalam Kristiawan, 2021).

Sedangkan menurut Rossi Prabowo (2010) ketahanan pangan harus mencakup faktor ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Faktor ketersediaan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kuantitas, kualitas, keberagaman dan keamanannya. Faktor distribusi berfungsi mewujudkan sistem penyaluran yang efektif dan efisien untuk menjamin agar masyarakat dapat memperoleh pangan dalam jumlah, kualitas dan keberlanjutan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Sedangkan faktor konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan

secara nasional memenuhi standar mutu, keberagaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa aspek terpenting dalam ketahanan pangan yaitu mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, distribusi dan konsumsi. Menurut peneliti, keempat aspek tersebut tidak bisa dipisahkan dalam proses penyelenggaraan program ketahanan pangan di suatu wilayah. Karena mengingat pangan merupakan bagian terpenting dalam kebutuhan pokok manusia, maka hal ini harus menjadi dasar bagi setiap individu manusia dalam suatu tempat atau kelompok tertentu untuk secara bersama-sama mengusahakan agar keempat aspek penting tersebut dapat terlaksana dengan baik, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam hal penyelenggaraan ketahanan pangan, pemerintah selaku pembuat kebijakan dan regulator perlu melibatkan semua unsur masyarakat setempat—terutama partisipasi petani sebagai kelompok masyarakat yang bersentuhan langsung dengan sektor pertanian dan pangan. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan ketahanan pangan di suatu wilayah menjadi tanggung jawab bersama masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan pangan secara umum. Disamping itu, setiap upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan perlu juga memprioritaskan tingkat ketersediaan pangan setiap rumah tangga/individu yang notabenenya mengalami kesulitan sumber daya baik secara ekonomi maupun aksesnya terhadap sumber-sumber pangan yang ada. Pada konteks ini peran serta pemerintah dan partisipasi aktif

masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal tata kelola ketahanan pangan di suatu wilayah; sehingga ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi dan distribusi pangan dapat diselenggarakan secara merata dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat guna mengatasi masalah kelaparan dan ketimpangan di wilayah tersebut.

3. Pemerintah Kalurahan/Desa

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan Desa yang secara aktual memiliki kedekatan yang kuat dengan masyarakatnya. Mengingat posisinya yang dekat dengan kehidupan masyarakat Desa, maka pemerintah Desa dapat mengetahui masalah, aspirasi, kepentingan maupun kebutuhan masyarakatnya secara langsung. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pada pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Berkaitan dengan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menerangkan bahwa Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Menurut Maria Eni Surasih (2006) pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf

hidup masyarakat. Pengertian ini menekankan bahwa pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah nasional yang penyelenggarannya ditujukan pada konteks lokal Desa. Disamping itu, UU Desa juga memberikan kewenangan kepada Desa—melalui pemerintah Desa—untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan potensi yang dimiliki Desa dan kepentingan masyarakat Desa. Dalam hal ini, pemerintah Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjunjung tinggi asas rekognisi dan subsidiaritas yang merupakan esensi dari otonomi Desa.

Menurut Sutoro Eko (2008) Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri, yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka melalui otonomi Desa, pemerintah Desa dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan Desa secara mandiri dengan memperhatikan beberapa aspek seperti potensi Desa, sumber daya yang dimiliki Desa baik itu sumber daya alam maupun manusianya, kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa. Pada prinsipnya pemerintah Desa merupakan agen penyelenggara kewenangan Desa itu sendiri. Adapun kewenangan Desa yang dimaksud yaitu meliputi: penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa (Pasal 18 UU Desa). Keempat kewenangan Desa tersebut pada gilirannya menjadi tugas

dan tanggung jawab pemerintah Desa yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan di tingkat Desa.

Lebih lanjut, pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun. Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015, yaitu antara lain:

- 1) Sekretaris Desa. Jabatan ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes) dan dibantu oleh staf. Sekdes terdiri atas tiga urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan. Masing-masing urusan tersebut dipimpin oleh Kepada Urusan (Kaur);
- 2) Pelaksana Teknis. Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan; dan
- 3) Pelaksana Kewilayahan. Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana wilayah yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Selain itu, jumlah pelaksana kewilayahan juga berdasarkan jumlah Dusun dengan memperhatikan luas wilayah kerja, kepadatan penduduk, kondisi geografis dan sarana prasarana penunjang tugas; yang kemudian dilaksanakan oleh Kepada Dusun atau yang disebut dengan nama lain.

Dalam UU Desa tepatnya pada pasal 26 menerangkan bahwa pemerintah Desa—dalam hal ini Kepala Desa yang juga dibantu oleh perangkat Desa—memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasayarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Desa secara eksplisit berwenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; menetapkan peraturan Desa; menetapkan anggaran dan pendapatan belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya pemerintah Desa juga berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; menjalin kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik; mengelola keuangan dan aset Desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kemudian dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban, maka pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Disamping itu, dengan adanya otonomi Desa maka pemerintah Desa juga memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan Desa secara mandiri, yang dapat disesuaikan dengan potensi Desa dan aspirasi masyarakat Desa itu sendiri. Namun, penyelenggaraan otonomi Desa juga mempunyai keterhubungan dengan sistem pemerintahan nasional dan kepentingan pembangunan nasional. Sehingga posisi pemerintah Desa pada konteks ini tidak terpisah dengan pemerintah di atasnya, tetapi sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional. Dengan demikian, pada konteks tertentu, pemerintah Desa juga dapat melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan dari pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi maupun pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dilain sisi, Desa juga dituntut agar mampu mengelola kewenangan yang berskala lokal Desa secara mandiri guna percepatan pembangunan secara nasional. Hal ini mengartikan bahwa konsep kemandirian Desa juga dapat memainkan peranan yang signifikan dalam membantu pemerintah

menyelesaikan berbagai persoalan di dalam negeri. Oleh karena itu, peneliti melihat peran pemerintah Kalurahan/Desa Kedungpoh secara kelembagaan sangat penting dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya lokal, yaitu pengembangan dan pengelolaan program Lumbung Mataraman guna mewujudkan ketahanan pangan lokal. Dalam hal ini, pemerintah Kalurahan/Desa selaku penyelenggara kebijakan dan regulasi dapat merumuskan tujuan, strategi, target dan capaian, metode kerja dan tata kelola Lumbung Mataraman tersebut agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan harapan yang diinginkan. Disamping itu, karena kaitannya dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan lokal, maka pemerintah Kalurahan Kedungpoh juga harus memastikan adanya keterlibatan masyarakat Desa terutama kelompok tani dalam proses pengembangan dan pengelolaan Lumbung Mataraman.

4. Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi dalam bahasa Inggris yaitu *participation*, yang berarti mengikutsertakan pihak lain. Di Indonesia, konsep partisipasi sudah terlembagakan sebagai salah satu unsur dalam sistem negara Demokrasi, yang secara praksis dapat dimanifestasikan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan, sistem politik, maupun dalam kehidupan sosial budaya masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam banyak hal, baik secara langsung maupun tidak langsung, semuanya sepakat bahwa partisipasi merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk turut serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan Negara,

Daerah, Desa maupun kelompoknya sendiri. Artinya, masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta sebagai subyek pembangunan, sebagai stakeholder dan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mubyarto dalam Laily (2015) partisipasi diartikan sebagai ketersediaan untuk membantu keberhasilan setiap kegiatan/program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan menurut Mikkelsen (2011) partisipasi diartikan sebagai berikut:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat pada kegiatan tertentu sekalipun tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah bentuk kepekaan masyarakat dalam menyikapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa setiap orang atau kelompok dapat mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan kepentingannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
- d. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan pihak yang melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial dari proyek pembangunan.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam setiap upaya perubahan yang ditentukan sendiri maupun secara bersama.

- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Penjelasan di atas secara umum menerangkan bahwa partisipasi masyarakat mencakup segala aspek kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dimana dalam setiap aspek tersebut senantiasa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta mengambil bagian di dalamnya. Partisipasi menjadi penting karena setiap kegiatan terutama yang berkaitan dengan kepentingan bersama merupakan produk dari dinamika sosial masyarakat itu sendiri. Sebab setiap kegiatan terutama yang berkaitan dengan pembangunan tentu memiliki tujuan sosial, dimana dampak-dampak yang dihasilkan dari pembangunan tersebut juga dirasakan langsung oleh masyarakat, dan karena itulah masyarakat perlu dilibatkan dan/atau terlibat sejak awal.

Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Mubyarto (dalam Sumaryadi, 2010) mengemukakan bahwa rakyat adalah titik sentral dan tujuan terakhir pembangunan, sehingga partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Lebih lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan sasaran pembangunan masyarakat, yaitu berkaitan dengan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta pembangkitan partisipasi masyarakat; dan sebagai upaya penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu berkaitan dengan yang lain, sehingga dapat dianggap sebagai satu kesatuan usaha.

- b. Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya melalui usaha menggerakan partisipasi masyarakat.
- c. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
- d. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi dalam satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian bisa membangun Desanya tanpa partisipasi vertikal dengan pihak lain.
- e. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desanya.

Lebih lanjut, perlu digarisbawahi bahwa bentuk partisipasi masyarakat bukanlah suatu tindakan yang sekonyong-konyong muncul begitu saja, tetapi dilandasi oleh dua hal, yakni: kesadaran diri (inisiatif) dan dorongan dari pihak lain (mobilisasi). Disamping itu, agar partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan teratur, maka partisipasi harus juga disesuaikan dengan mekanisme dan tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan/program. Dalam menyesuaikan mekanisme dan tahapan tersebut, setidaknya, partisipasi masyarakat dapat dimuaraakan pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Artinya, bentuk partisipasi dalam setiap tahapan tersebut mengandung pola dan pendekatan yang berbeda-beda.

Uphoff dalam Nasution (2009) membedakan partisipasi dalam 4 (empat) tipe fungsi, yaitu:

a. *Participation in planning and decision making*

Partisipasi bentuk ini merupakan keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan kegiatan/program, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana program yang akan ditetapkan. Partisipasi dalam perencanaan dan pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.

Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan, maka masyarakat juga dapat memilih, mengusulkan dan menentukan program mana yang dianggap baik dan cocok bagi kebutuhan dan kepentingan mereka. Tahap ini juga erat kaitannya dengan proses penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat dalam kehidupan demokratis.

b. *Participation in implementation*

Partisipasi dalam konteks ini adalah keikutsertaan masyarakat dalam operasional kegiatan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program, tingkat partisipasi dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) masyarakat yang terlibat. Adapun bentuk-bentuk yang di partisipasikan dalam tahap pelaksanaan

program dapat berupa tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian saja yang terlibat, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi atau tidak, sekali-sekali atau berulang-ulang.

c. *Participation in benefits*

Partisipasi bentuk ini adalah keikutsertaan masyarakat untuk menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, jembatan, gedung, air minum dan berbagai sarana prasarana publik) adalah bentuk dari partisipasi dalam menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Penikmatan program pembangunan juga ditujukan kepada pegawai pengelola dalam peningkatan kesejahteraannya termasuk peningkatan daya potensi dan kreativitasnya. Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan hasil-hasil pembangunan.

d. *Participation in monitoring and evaluation*

Partisipasi dalam bentuk ini adalah keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan/program pembangunan serta menilai hasilnya. Proses pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan/program pada prinsipnya harus didasarkan pada

kriteria-kriteria ideal (standar) tertentu, perihal apakah sesuai atau tidak sesuai dengan yang direncanakan dan disepakati sebelumnya.

Kriteria yang dimaksud yaitu mencakup hal-hal yang telah direncanakan dan disepakati sebelumnya seperti tujuan, manfaat, targetan, tata kerja, metode dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program. Partisipasi dalam bentuk pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui pemberian saran, kritikan atau protes baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa partisipasi dalam kaitannya di Indonesia sebagai negara demokratis, partisipasi bahkan sudah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara untuk turut andil dalam setiap kegiatan/program pembangunan yang menyakut dirinya, baik itu kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada setiap tingkatannya maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Dalam hal berpartisipasi, masyarakat tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan program, melainkan pada setiap tahap dalam penyelenggaraan program yang mencakup tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, menikmati dan memanfaatkan hasilnya, pengawasan dan evaluasi program. Dengan melalui mekanisme dan tahapan tersebut, maka partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien.

Menurut peneliti, partisipasi masyarakat harus dimaknai sebagai proses dan tujuan. Proses dalam arti bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam perumusan kebijakan sehingga program yang dihasilkan sesuai

dengan aspirasi masyarakat. Sedangkan tujuan dalam arti bahwa masyarakat dapat bergerak bersama untuk mewujudkan tujuan program yang telah rencanakan dan disepakati guna peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Artinya, proses untuk mencapai tujuan tidak terlepas dari tingkat partisipasi aktif masyarakat itu sendiri sebagai subyek dalam pembangunan. Dengan demikian, partisipasi aktif atas dasar kesadaran (inisiatif) masyarakat itu sendiri jauh lebih bermakna ketimbang partisipasi atas dorongan (mobilisasi) dari pihak eksternal.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif. Melalui Deskriptif Kualitatif maka peneliti akan menggunakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai pemandu untuk memotret dan mengeksplorasi peristiwa yang terjadi di lapangan secara menyeluruh dan mendalam. Menurut Moleong (2021) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Menurut Sutopo dan Arief (2016) menyebutkan bahwa penelitian Deskriptif Kualitatif terdiri atas beberapa pengertian, yaitu: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok; 2) kegiatan terencana untuk menangkap praktek dan pemikiran responden terhadap dunianya (*ethnic and verstehen*) yang selalu majemuk,

berbeda dan dinamis; dan 3) bersifat menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan (*to describe, explore and explain*). Sejalan dengan itu, Ulfatin (2015) juga menerangkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai karakteristik dari fenomena yang diteliti. Salah Satu ciri dari metode ini adalah bersifat naratif dan umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana dan mengapa (*what, how, dan why*).

Penelitian deskriptif kualitatif dalam hal ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta dan keadaan yang terjadi di lapangan yang mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat. Oleh karenanya, melalui penelitian ini maka peneliti dapat mengetahui perihal sejauh mana proses pelembagaan Lumbung Mataraman dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kalurahan Kedungpoh, yang ditinjau dari upaya pemerintah Kalurahan/Desa dan partisipasi Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat.

2. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi objek dan subjek penelitian. Objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Sedangkan subjek penelitian adalah manusia itu sendiri yang memberikan informasi atau mengekspresikan suatu keadaan yang diteliti. Apabila dilihat dari sumbernya, obyek dan subyek dalam penelitian kualitatif disebut sebagai situasi sosial (*social situation*) yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang

berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2014). Adapun unit analisis dalam penelitian ini yaitu meliputi:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu permasalahan yang diteliti oleh peneliti, yang berkaitan dengan proses pelembagaan Lumbung Mataraman dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kalurahan Kedungpoh.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah narasumber atau informan yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau objek yang diteliti. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu meliputi: Pemerintah Desa, Pengurus Lumbung Mataraman dan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), dan tokoh masyarakat lainnya. Berikut adalah daftar informan dalam penelitian ini:

Tabel 1.1. Daftar Informan Penelitian

| No. | Nama | Usia | Gender (P/L) | Pendidikan | Jabatan |
|-----|-----------------|------|--------------|------------|--|
| 1. | Ruslan Mudzakir | 49 | L | S1 | Carik (Sekretaris Desa) |
| 2. | Kolib Nurhidin | 35 | L | SLTA | Kaur Tata Laksana/Pengelola Lumbung Mataraman |
| 3. | Didik Purnomo | 40 | L | SLTA | Kasi Ulu-Ulu/Direktur Lumbung Mataraman |
| 4. | Iwan Suswanto | 38 | L | SLTA | Dukuh Nglorok/Pengelola Lumbung Mataraman |
| 5. | Julius Giri | 51 | L | SLTA | Dukuh Gentungan |
| 6. | Heni Putriani | 42 | P | SLTA | Ketua KWT Mekar/Pengelola Lumbung Mataraman |
| 7. | Suyanti | 45 | P | SD | Ketua KWT Lantip Makarti/Pengelola Lumbung Mataraman |

(Sumber: Data Lapangan 2024)

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif pada prinsipnya bertujuan untuk menangkap dan mengungkapkan suatu gejala, fakta atau realitas, dan peristiwa tertentu yang hanya dapat dipahami apabila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya sebatas melihat apa yang terjadi di permukaan semata. Creswell (2016) menyebutkan bahwa proses pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan dengan cara mengamati peristiwa dan menghimpun informasi atau cerita dari pelaporan pengalaman individu atau kelompok serta membahas arti dari pengalaman tersebut.

Arikunto (2000) juga menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti guna mempermudah proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan

secara komprehensif dan tersistematis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengamati segala peristiwa yang terjadi di dalam alam semesta. Menurut Bachtiar., *et al* (1985) kegiatan penelitian mulanya hanya diarahkan pada usaha untuk memperoleh sebanyak mungkin pengetahuan tentang lingkungan alam manusia, tetapi terus berkembang pada usaha untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas seperti kegiatan manusia, hubungan antar manusia, pikiran dan perilaku manusia.

Pada prinsipnya, dalam observasi penelitian ini, peneliti mengamati bagaimana proses Pelembagaan Lumbung Mataraman Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kalurahan Kedungpoh, yang ditinjau dari peran pemerintah Kalurahan/Desa dan partisipasi Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat.

b. Wawancara

Wawancara, menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014) merupakan suatu kegiatan dimana terjadinya pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang dapat menghasilkan konstruksi makna tentang topik tertentu. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa wawancara merupakan proses interaksi yang dilakukan antar dua orang atau bahkan lebih, yang saling bertemu atau bertatap muka, melakukan *sharing* ide dan

pengalaman, serta mengkonstruksikan suatu makna tentang objek atau fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancaraai beberapa informan seperti pemerintah Desa, BPD, pengurus BUMDesa, pengurus dan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), serta unsur masyarakat lainnya yang sekiranya dapat memberikan informasi dengan jelas dan detail terkait proses pelembagaan Lumbung Mataraman dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kalurahan Kedungpoh, yang ditinjau dari peran pemerintah Kalurahan/Desa dan partisipasi Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat.

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Mulyana, 2002) dokumentasi merupakan bahan tertulis, rekaman atau film tertentu yang tidak terpisahkan dengan kebutuhan penelitian. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat notulen rapat dan sebagainya. Artinya, seorang peneliti dapat pula menggunakan dokumen-dokumen tersebut dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Lebih lanjut, dokumen pada hakikatnya merupakan catatan atau rekaman tentang suatu peristiwa yang sudah berlalu, yang telah diarsipkan.

Adapun dokumen penting yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa file dan arsip tulisan yang memuat data-data yang berhubungan dengan objek penelitian seperti profil Kalurahan/Desa, Peraturan Kalurahan/Desa, data penduduk, laporan kegiatan, notulensi rapat,

laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan/Desa, struktur organisasi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan Desa, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Creswell (2016) menjelaskan bahwa dalam hal analisis data diperlukan penafsiran (*interpretation*) terhadap data-data (teks, rekaman, gambar dan dokumen lainnya) yang telah dihimpun, kemudian diklasifikasi dan dikategorisasikan guna memunculkan suatu ide yang berkembang menjadi tema-tema. Menurutnya, langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian kualitatif yaitu meliputi identifikasi masalah atau fenomena yang akan dieksplorasi; pilih satu atau lebih subjek penelitian untuk dipelajari, menyajikan dan menarasikan data; kumpulkan cerita atau informasi dari subyek penelitian yang dipilih; validasi keakuratan data; dan membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh.

Lebih lanjut, menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) menyebutkan bahwa teknik analisis data yaitu meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data, menemukan tema dan pola pembahasan yang akan dianalisis. Hal ini berarti bahwa reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh,

kemudian dianalisis dan dinarasikan dalam bentuk tulisan oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan pada data yang telah direduksi kemudian dituangkan dalam bentuk naratif, yang didukung oleh dokumentasi, tabel, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan dan perasaan yang sering dan dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

BAB II

PROFIL KALURAHAN KEDUNGPOH, KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah

Awal mula keberadaan Kalurahan Kedungpoh ada masukan/informasi dari pelaku sejarah/tetua bahwa Kalurahan Kedungpoh mempunyai tiga (3) jenis informasi mengenai sejarah, yaitu: sejarah Mulo Buko masyarakat yang ada di Desa Kedungpoh, sejarah Mulo Buko nama Kalurahan, dan sejarah Mulo Buko Adeking Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh. Ketiganya menjadi dasar dalam penggalian sejarah berdirinya Kalurahan Kedungpoh. Namun yang paling kuat dan disepakati adalah sejarah “*Mulo Buko Adeging* Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh”, karena sejarah tersebut membuktikan bahwa Kedungpoh diakui sebagai Kalurahan yang mempunyai otonom.

Sejarah Mulo Buko masyarakat yang ada di Kalurahan Kedungpoh awalnya tidak ada yang tahu tentang keberadaan masyarakat Kedungpoh. Namun dengan keberadaan peninggalan petilasan yang ada di Kedungpoh, secara otomatis membuktikan bahwa sebelum terbentuknya Kalurahan Kedungpoh sudah ada komunitas masyarakat yang hidup pada waktu itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan “Petilasan Pesarehan Kwasen”.

Namun ada cerita lagi bahwa ketika terjadi huru-hara di Keraton Surakarta pada masa lampau, ada sekelompok masyarakat wilayah Tembayat (sekarang Bayat) yang datang ke wilayah Kedungpoh yang dipimpin oleh Kyai Ahmad Dalem dan menetap di suatu wilayah yang sekarang namanya Padukuhan Kedungpoh Kidul. Pada waktu itu Kyai Ahmad Dalem berprofesi

sebagai Empu (pembuat pusaka). Bekas dari tempat tersebut berada di RT02/RW01 Padukuhan Kedungpoh Kidul. Ahmad Dalem mempunyai putra yang bernama Jumput alias Ahmad Rifa'i. Sedangkan Ahmad Rifa'i mempunyai teman seperjuangan yang bernama Ahmad Kiramu yang merupakan seorang pelarian karena menentang pemerintahan kolonial Hindia Belanda dari wilayah Gunungkidul bagian selatan. Ahmad Kiramu inilah yang sering disebut masyarakat sekarang sebagai penyebar agama islam di Kedungpoh pada khususnya dan wilayah Kecamatan Nglipar pada umumnya.

Air merupakan sumber kehidupan masyarakat. Cara memperoleh air pada waktu itu dengan cara alami dan tradisional. Belum ada sumur apalagi PAM seperti sekarang ini. Masyarakat hanya memanfaatkan sumber mata air yang ada. Salah satunya adalah genangan air (*kedung*) yang terletak di Kedungpoh Kidul. Di samping *Kedung* tersebut ada sebuah pohon *Poh* (Pelem). Dari pola kehidupan waktu itu, masyarakat sering menyebut daerah tersebut dengan sebutan Kedungpoh. Karena banyaknya warga yang memanfaatkan air tersebut, lambat laun nama Kedungpoh menjadi nama Kalurahan Kedungpoh hingga saat ini.

Kalurahan Kedungpoh merupakan bagian dari Kabupaten Gunungkidul, secara otonomi adalah Kalurahan yang berpemerintahan sejak tahun 1911. Wilayah Kedungpoh merupakan bagian dari *Kademangan Kedungkeris* (menurut cerita/kesaksian para sesepuh Kalurahan). Pada masa kolonial Hindia Belanda, kerajaan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai bagian wilayah yaitu Katumenggungan Gunungkidul. Katumenggungan Gunungkidul kemudian membentuk Desa-desa yang salah

satunya adalah Desa Kedungpoh. Hal ini diperkuat oleh pengakuan para pelaku sejarah bahwa Beslit/SK/Serat Kekancingan Lurah yang pertama pada tahun 1911 yakni Eyang Lurah Karto Rejo, yang merupakan pemimpin pertama Kalurahan Kedungpoh.

Cerita tersebut menjadi bahan kajian oleh masyarakat, tokoh, dan Pemerintahan Kalurahan dalam menggali sejarah berdirinya (*adeking*) Kalurahan Kedungpoh. Anggapan bahwa masyarakat Kalurahan Kedungpoh sudah ada sebelum adanya Beslit/SK/Serat Kekancingan Lurah, ini terbukti dengan sejarah berupa petilasan-petilasan dan nama kampung yang ada di Desa Kedungpoh, seperti petilasan: Pasareyan Kwasen, Kampung Tambran, Kampung Nanasan, Kampung Dawung, Alas Parangan, Kampung Ringin Putih, Kampung Penthuk, Alas Cering, Sungai Kedung Gender, Grumung Gojo, dan sebagainya. Sehingga ada pertimbangan dari beberapa tokoh bahwa Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh sudah ada sejak tahun 1911.

Sumber (pembuktian) tentang pemerintahan Kalurahan Kedungpoh pada tahun 1911 belum bisa menemukan secara Deyure keberadaan SK tersebut, tetapi secara *defacto* telah banyak kesaksian dan pemberian dari tokoh/tetua Kedungpoh, yang secara formal Pemerintah Kalurahan Kedungpoh telah menggali sejarah secara langsung dengan melalui investigasi dalam agenda forum penggalian sejarah Kalurahan Kedungpoh pada Januari 2008. Tokoh-tokoh yang jadir sebagai narasumber dalam agenda tersebut, antara lain: Pawiro Wigno (mantan Dukuh Kedungpoh Lor), Slamet Purwo Diwarno (mantan Dukuh Nglorog), Sukino (mantan Dukuh), Noto Wiyono (mantan Dukuh), Ngatmo Nado (tokoh tetua desa), Muhadi (mantan abdi

Lurah Karto Rejo), Ibu Samirah(istri mantan pamong desa), Doto (tokoh desa). Kegiatan ini difasilitasi dan diinisiasi oleh pemerintah Kalurahan Kedungpoh pada waktu itu (2008), yang dipimpin oleh Edi Susilo sebagai Lurah, dibantu oleh Joko Santoso sebagai Carik dan Mugiharto sebagai Ekobang Kalurahan Kedungpoh.

B. Kondisi Geografis

Kalurahan Kedungpoh merupakan salah satu Kalurahan dari Kapanewon Ngilipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Kedungpoh memiliki luas wilayah 10.799.830 Ha, yang terdiri dari 10 padukuhan unsur kewilayahan dengan jumlah penduduk sebanyak 5.796 jiwa dan 1.370 KK. Sebagian besar yang secara geografis terletak pada lahan kemiringan/pegunungan, bukit dan sebagian dari wilayah dataran rendah.

Kalurahan Kedungpoh memiliki batas wilayah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kalurahan Penggol;
2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kalurahan Katongan;
3. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kalurahan Mertelu, Kapanewon Kedangsari; dan
4. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kalurahan Ngilipar.

Secara umum letak geografis Kalurahan Kedungpoh berada di bagian utara Kabupaten Gunungkidul. Sebagian wilayah di Kalurahan Kedungpoh merupakan dataran tinggi yang terbentuk dari bebatuan kapur, dan sebagiannya lagi merupakan dataran rendah dengan tanah *aluvial*. Selain itu, Kalurahan Kedungpoh secara umum berada pada ketinggian 200 s/d 500

meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 700mb/tahun dan suhu udara 27⁰-30⁰ C (Derajat Celcius).

C. Kondisi Demografis

Secara umum, Kalurahan Kedungpoh memiliki total jumlah penduduk sebanyak 6.730 jiwa, yang berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki sebanyak 3.340 jiwa dan perempuan sebanyak 3.390 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut, menunjukkan bahwa populasi perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Berikut ini adalah jumlah penduduk Kalurahan Kedungpoh berdasarkan beberapa kriteria:

1. Data Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah Padukuhan

Tabel 2.1. Data Penduduk Berdasarkan Wilayah Padukuhan

| No. | Nama Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jumlah Jiwa |
|-------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1. | Gentungan | 6 | 289 | 855 |
| 2. | Gojo | 12 | 305 | 926 |
| 3. | Kedungpoh Kidul | 4 | 122 | 411 |
| 4. | Kedungpoh Kulon | 4 | 208 | 613 |
| 5. | Kedungpoh Lor | 7 | 192 | 689 |
| 6. | Kedungpoh Tengah | 9 | 208 | 651 |
| 7. | Klayar | 6 | 225 | 748 |
| 8. | Mojosari | 4 | 181 | 554 |
| 9. | Nglorog | 5 | 165 | 487 |
| 10. | Sinom | 8 | 246 | 796 |
| Total | | 65 | 2.141 | 6.730 |

(Sumber: Data Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023)

Jika dilihat dari data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Kedungpoh memiliki 10 Padukuhan, 65 RT dan sebanyak 2.141 KK. Data di atas menunjukkan bahwa Padukuhan Gojo memiliki jumlah RT paling banyak, yaitu 12 RT dan sekaligus merupakan

Padukuhan dengan jumlah KK terbanyak (305 KK) serta dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 926 jiwa. Sedangkan Padukuhan yang paling sedikit jumlah KK dan jumlah penduduknya yaitu Padukuhan Kedungpoh Kidul dengan jumlah 122 KK dan 411 jiwa. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk setiap Padukuhan di Kalurahan Kedungpoh yaitu lebih dari 400 jiwa.

2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Kelompok Pendidikan | Jumlah Jiwa |
|-------|--------------------------------|-------------|
| 1. | Tidak/Belum Sekolah | 1530 |
| 2. | Tamat SD/sederajat | 1634 |
| 3. | Tidak/belum Tamat SD/sederajat | 736 |
| 4. | Tamat SLTP/sederajat | 1286 |
| 5. | Tamat SLTA/sederajat | 1379 |
| 6. | Diploma I/II | 24 |
| 7. | Akademi/Diploma III/S. Muda | 31 |
| 8. | Diploma IV/Strata I | 103 |
| 9. | Strata II | 4 |
| 10. | Strata III | 3 |
| Total | | 6.730 |

(Sumber: Profil Kalurahan Kedungpoh 2023)

Dari data di atas, menunjukkan bahwa secara tingkat pendidikan lebih banyak masyarakat Kalurahan Kedungpoh yang lulusan SD/sederajat dengan jumlah 1.635 jiwa. Kemudian posisi kedua yaitu penduduk yang tidak/belum sekolah berjumlah 1.530 jiwa. Sementara yang penduduk lulusan SLTA/sederajat berada di posisi ketiga sebanyak 1.379 jiwa, tetapi dari angka tersebut tampaknya tidak banyak juga yang kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memperoleh gelar Diploma

hingga Sarjana yang masih minim, yang jika ditotalkan jumlahnya hanya mencapai 165 jiwa.

Menurut peneliti, sekalipun lulusan SLTA/sederajat secara umum merupakan suatu pencapaian pendidikan yang cukup ideal—dengan asumsi bahwa meskipun tidak kuliah, minimal lulus SMA—tetapi angka lulusan SLTA/sederajat di Kalurahan Kedungpoh masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan total jumlah penduduknya. Sebab populasi penduduk Kalurahan Kedungpoh saat ini didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan lulusan SLTP/sederajat ke bawah dengan total jumlah sebanyak 5.188 jiwa.

Berdasarkan data terkait dengan tingkat pendidikan penduduk di Kalurahan Kedungpoh tersebut, menunjukkan bahwa tingkat pencapaian pendidikan masyarakat masih timpang, karena mayoritas masyarakat Kedungpoh hanya lulusan SD/sederajat, tidak/belum tamat SD, dan tidak/belum sekolah. Menurut peneliti, masyarakat yang hanya lulusan SLTP/sederajat ke bawah tersebut merupakan tingkat pendidikan yang sangat rentan, yang jika dikaitkan dengan dunia kerja maka termasuk dalam kategori pekerja tidak terampil (*unskills worker*). Artinya, dengan total jumlah mereka yang begitu banyak, maka ini juga perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kalurahan Kedungpoh dalam hal memberikan pelatihan dan pemberdayaan agar mereka juga memiliki daya saing dan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan Kalurahan guna kesejahteraan masyarakat Kedungpoh secara umumnya.

3. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 2.3. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

| No. | Pekerjaan | Jumlah Jiwa |
|-------|-----------------------------|-------------|
| 1. | Belum/tidak bekerja | 1419 |
| 2. | Petani/perkebunan | 1217 |
| 3. | Wiraswasta | 1196 |
| 4. | Mengurus rumah tangga | 1083 |
| 5. | Pelajar/mahasiswa | 929 |
| 6. | Karyawan swasta | 387 |
| 7 | Buruh harian lepas | 205 |
| 8. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 61 |
| 9. | Pensiunan | 49 |
| 10. | Guru | 35 |
| 11. | Karyawan honorer | 27 |
| 12. | Perdagangan | 25 |
| 13. | Buruh tani/perkebunan | 20 |
| 14. | Perangkat Kalurahan | 20 |
| 15. | Sopir | 17 |
| 16. | Pembantu rumah tangga | 8 |
| 17. | Pedagang | 5 |
| 18. | Kepolisian RI | 5 |
| 20. | Mekanik | 3 |
| 21. | Buruh Peternakan | 3 |
| 22.. | Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 3 |
| 23. | Tukang kayu | 2 |
| 24. | Tukang batu | 1 |
| 25. | Dokter | 1 |
| 26. | Wartawan | 1 |
| 27. | Lain-lain | 8 |
| Total | | 6.730 |

(Sumber: Profil Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa profesi atau pekerjaan masyarakat Kedungpoh sangat beragam, yaitu sebanyak 27 jenis pekerjaan. Dari data di atas, diketahui bahwa masyarakat yang belum/tidak bekerja lebih mendominasi dengan jumlah sebanyak 1.464 jiwa. Kemudian, jumlah penduduk terbanyak kedua disusul oleh petani/perkebunan sebesar 1.217 jiwa. Selain itu, jumlah penduduk yang

berprofesi sebagai wiraswasta juga menempati posisi ketiga terbanyak dengan jumlah 1.196 jiwa.

Menurut peneliti, penduduk dengan status belum/tidak bekerja, pelajar/mahasiswa dan pengurus rumah tangga adalah penduduk yang dikategorikan tidak berpenghasilan. Artinya, jika jumlah ketiga jenis pekerjaan ini ditotalkan, maka terdapat sebanyak 3.476 jiwa penduduk Kalurahan Kedungpoh yang tidak berpenghasilan. Hal ini berarti bahwa setengah dari populasi masyarakat Kedungpoh tidak berpenghasilan. Selain itu, petani/perkebunan, buruh tani/perkebunan, buruh harian lepas dan pekerjaan sejenisnya juga berada dalam kondisi yang tidak memiliki kepastian penghasilan. Sebab hal ini juga diperparah dengan kondisi tingkat pendidikan mayoritas penduduk Kedungpoh yang hanya lulusan SD/sederajat dan belum/tidak bersekolah.

Oleh karena itu, menurut peneliti, sekalipun Kalurahan Kedungpoh mempunyai potensi sumber daya alam yang berlimpah, tapi potensi sumber daya manusianya masih sangat memprihatinkan. Sebab tenaga kerja yang tersedia pun adalah tenaga kerja yang tidak terampil (*unskill*) karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga hal ini menyebabkan mayoritas masyarakat Kedungpoh menjadi belum/tidak bekerja. Dengan demikian, menurut peneliti, pemerintah Kalurahan setempat perlu memperbanyak kegiatan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat guna mengatasi masalah pendidikan dan pekerjaan masyarakat. Disamping itu, perlu juga membuka lapangan pekerjaan guna meminimalisir angka pengangguran di Kalurahan Kedungpoh.

4. Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 2.4. Data Penduduk Berdasarkan Umur

| No. | Kelompok Umur | Jumlah Jiwa |
|-------|------------------|-------------|
| 1. | 0 s/d 1 Tahun | 28 |
| 2. | 2 s/d 14 Tahun | 923 |
| 3. | 15 s/d 19 Tahun | 511 |
| 4. | 20 s/d 29 Tahun | 943 |
| 5. | 30 s/d 39 Tahun | 888 |
| 6. | 40 s/d 49 Tahun | 1026 |
| 7. | 50 s/d 59 Tahun | 858 |
| 8. | 60 s/d 69 Tahun | 632 |
| 9. | 70 Tahun ke atas | 921 |
| Total | | 6.730 |

(Sumber: Profil Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi masyarakat Kedungpoh lebih banyak yang berusia 40 s/d 49 tahun dengan jumlah sebanyak 1.026 jiwa dan masih dalam kategori usia produktif. Urutan kedua yaitu diisi oleh penduduk yang berusia 20 s/d 29 tahun sebanyak 923 jiwa dan merupakan usia yang paling produktif. Tapi angka ini selisih tipis dengan jumlah penduduk dalam usia 2 s/d 14 tahun sebanyak 923 jiwa dan usia 70 tahun ke atas sebanyak 921 jiwa. Sedangkan penduduk dengan kelompok usia terendah yaitu usia 0 s/d 1 tahun sebanyak 28 jiwa.

Di Indonesia, usia 15 s/d 59 tahun pada umumnya merupakan usia produktif, sedangkan usia belum produktif yaitu usia anak-anak dari 0 s/d 14 tahun dan usia tidak produktif lagi yaitu usia 60 tahun ke atas. Jika dilihat berdasarkan kategori tersebut, maka mayoritas penduduk Kedungpoh adalah masyarakat dengan kategori usia produktif (usia 15 s/d 59 tahun) sebanyak 4.226 jiwa. Sedangkan penduduk dengan kategori usia belum/tidak lagi produktif (usia 0 s/d 14 tahun dan 60 tahun ke atas) yaitu

sebanyak 2.504 jiwa. Karena lebih banyak usia dengan kategori produktif, maka hal ini telah menunjukkan bahwa Kalurahan Kedungpoh sejatinya memiliki potensi SDM yang sangat besar. Namun yang masih menjadi tantangan adalah bagaimana pemerintah Kalurahan Kedungpoh mengatasi masalah pendidikan dan meningkatkan keterampilan masyarakat secara terus-menerus.

5. Data Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2.5. Data Penduduk Berdasarkan Agama

| No. | Agama/Kepercayaan | Jumlah Jiwa |
|-------|-------------------|-------------|
| 1. | Islam | 6708 |
| 2. | Kristen | 15 |
| 3. | Katolik | 7 |
| Total | | 6.730 |

(Sumber: Profil Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023)

Mayoritas penduduk Kalurahan Kedungpoh memeluk agama Islam dengan jumlah 6.708 jiwa, kemudian disusul oleh agama Kristen sebanyak 15 jiwa dan Katolik 7 jiwa. Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 3 agama saja di Kalurahan Kedungpoh, yaitu agama Islam, Kristen dan Katolik. Namun sekalipun agama Islam merupakan yang terbesar, tetapi dengan adanya agama lain, maka hal ini telah menunjukkan bahwa masyarakat Kedungpoh memiliki keberagaman, serta toleransi yang besar karena hingga saat ini belum pernah terjadi konflik antar umat beragama di Kalurahan Kedungpoh.

D. Ekonomi dan Potensi Desa

1. Pasar Gojo

Pasar Gojo merupakan pasar tradisional yang mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, karena masyarakat setempat dapat menjual hasil usahanya dan masyarakat lainnya dapat membeli sesuai dengan kebutuhan masyarakat mulai dari sembako hingga bahan makanan seperti ayam, daging sapi, sayuran, buah, dan peralatan yang digunakan sehari-hari. Pasar ini juga merupakan salah satu pusat perekonomian Kalurahan Kedungpoh, dimana mayoritas penjual di pasar tersebut adalah masyarakat Kedungpoh itu sendiri.

2. Kelompok Wanita Tani (KWT)

KWT adalah kumpulan dari wanita dan ibu-ibu yang berprofesi sebagai petani yang berada di setiap Padukuhan di Kalurahan Kedungpoh. Saat ini KWT diberi lahan kelola oleh pemerintah Kalurahan Kedungpoh yaitu di Lumbung Mataraman untuk menanam tanpa dipungut biaya yang besar, tetapi cukup dengan bagi hasil 10% per panen sebagai pemasukan kas Lumbung Mataraman guna pengembangan usaha lebih lanjut kedepannya. Adapun hasil utama KWT di Lumbung Mataraman yaitu cabe, bawang merah, tomat, singkong, kacang tanah, dan aneka sayur-mayur. Hasil dari komoditas tersebut dapat dijual dan dikelola oleh KWT kemudian setiap bulan akan dibagi kepada anggota KWT dan disisakan beberapa untuk menjadi kas dari KWT maupun Lumbung Mataraman itu sendiri.

3. Pariwisata Kalurahan

a. Kedungpoh Park

Kedungpoh Park merupakan salah satu tempat wisata alam yang di Kalurahan Kedungpoh tepatnya di Padukuhan Kedungpoh Lor. Wisata ini memperlihatkan pemandangan gunung Sewu berupa barisan bukit-bukit yang tersusun rapi dan indah. Selain pesona alam yang dapat dinikmati saat matahari terbit maupun terbenam, Kedungpoh Park juga menyediakan fasilitas kolam renang untuk anak-anak, sehingga sangat cocok untuk rekreasi keluarga. Disamping itu, juga tersedia kantin dan kulineran dengan beragam menu makanan, aneka minuman, berbagai cemilan dan snack.

Berbagai kegiatan seperti acara 17 Agustusan maupun pentas seni sering dilaksanakan di kedungpoh Park, karena tersedia panggung (podium) dan tempatnya yang cukup luas serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya seperti parkiran yang luas, akses jalan yang mudah, kamar mandi bersih, tempat cuci tangan di banyak titik, jaminan keamanan dan kenyamanan para pengunjung, dan juga terdapat kurang lebih sekitar 20 sampai 25 meja yang dapat digunakan pengunjung yang ingin menghabiskan waktu di tempat tersebut.

b. Kampung Madu

Kampung Madu adalah tempat berbasis eduwisata yang berkolaborasi dengan kampus UGM dalam pembuatannya, yang pada tahun 2009 sudah dimulai budidaya lebah Apis Cerana. Lokasi Kampung Madu terletak di Padukuhan Kedungpoh Lor dan menjadi salah satu *home* industri yang ada di Kalurahan Kedungpoh. Hasil

panen dari Kampung Madu ini dijual melalui kelompok UMKM guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Rata-rata madu yang dapat dihasilkan sekitar 1,5 kuintal setiap kali panen, yaitu setiap 3 bulan sekali atau dengan kata lain setiap setahun mampu menghasilkan 6 kuintal madu. Harga madu murni tersebut perkilo bisa mencapai harga Rp. 200.000/kg.

c. Desa Wisata Klayar

Desa Wisata Klayar dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kedungpoh. Padukuhan Klayar sendiri memiliki potensi alam perbukitan yang menawarkan pemandangan yang indah, juga terdapat hutan kayu putih, aliran Sungai Oya yang melintasi Padukuhan Klayar, dan terdapat Bendungan Kedung Lembu. Bendungan Kedung Lembu merupakan destinasi andalan berupa danau buatan yang luas dan airnya berasal dari mata air yang sengaja dibendung. Disini para pengunjung dapat menikmati wisata air seperti becak air, naik kapal, mendayung perahu hingga spot-spot foto. Sedangkan wisata aliran Sungai Oya menawarkan pemandangan taman bunga di tepi sungai, tersedia *stone park* yakni bebatuan yang disusun di sekeliling taman bunga, terdapat pula tempat *outbound* dan *camping ground* bagi pengunjung yang ingin berkemah.

4. Lumbung Mataraman

Lumbung Mataraman adalah tempat wisata sekaligus digunakan oleh Kelompok Wanita Tani untuk menanam bermacam tanaman seperti buah dan sayuran. Lumbung Mataraman merupakan program ketahanan

pangan pemerintah Provinsi DIY dan telah diresmikan secara langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 04 Desember 2023. Lumbung Mataraman memiliki potensi untuk pengembangan usaha pertanian masyarakat karena di dalamnya telah tersedia tanah kas Kalurahan seluas 10 hektar. Selain untuk pengembangan sektor pertanian, saat ini juga sedang mengembangkan sektor perternakan dan perikanan.

Selain itu, Lumbung Mataraman juga memiliki daya tarik sebagai wisata edukasi yang dapat menarik perhatian pengunjung melihat secara langsung bagaimana proses dari para petani melakukan kegiatan mulai dari penanaman, perawatan dan panen. Di sekitar lumbung juga disediakan gazebo bagi pengunjung yang ingin bersantai, membeli makanan dan minuman. Lumbung Mataraman juga menyediakan bahan edukasi bagi pengunjung yang ingin belajar terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sistem pertanian terpadu.

E. Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan

1. Pemerintah Kalurahan Kedungpoh

a) Visi Misi

Visi:

“Menjadi Kedungpoh Lebih Baik, Cerdas, Mandiri, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”.

Misi:

Adapun Misi dari Kalurahan Kedungpoh yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang jujur dan berakhlak mulia;

- 2) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kalurahan;
- 3) Meningkatkan perekonomian Kalurahan melalui pengembangan potensi lokal;
- 4) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana umum; dan
- 5) Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan penyakit menular.

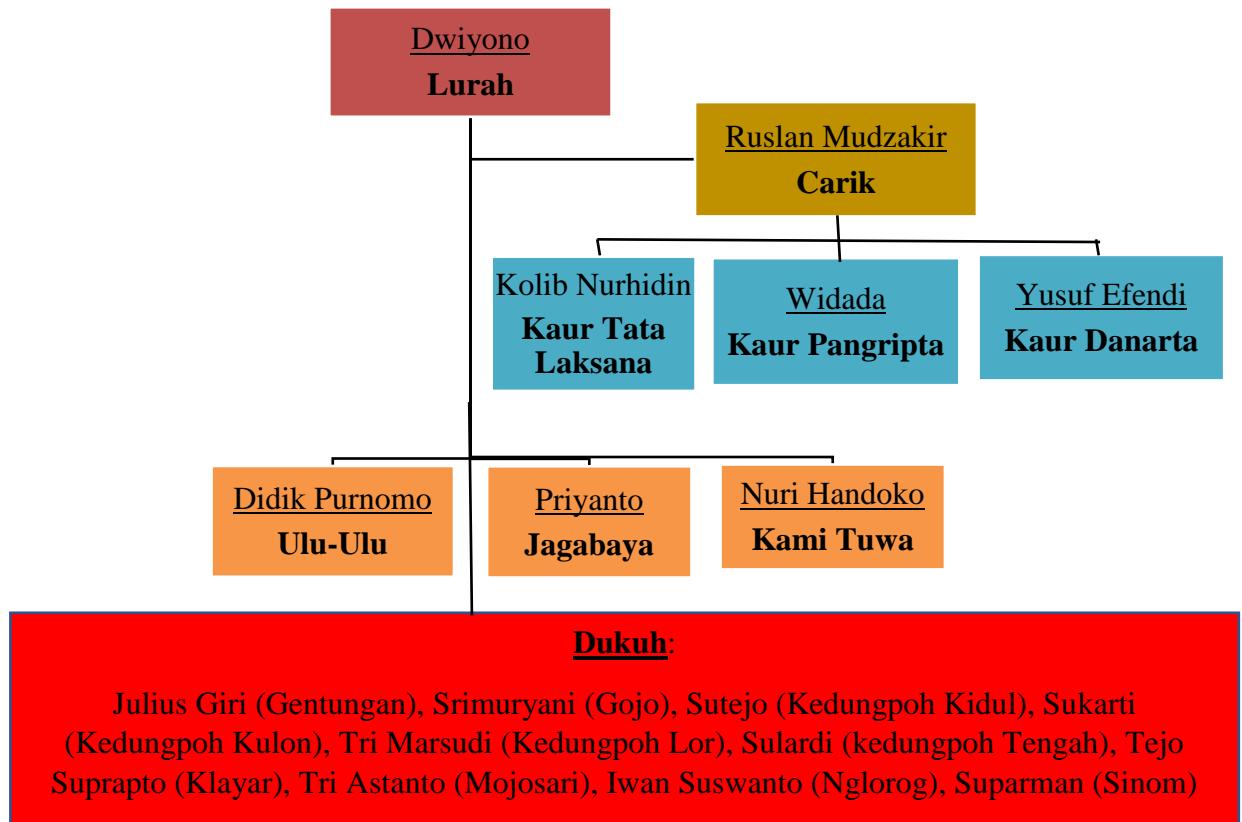
Jika dilihat dari pemaparan Visi dan Misi Kalurahan Kedungpoh di atas, maka dapat peneliti simpulkan beberapa hal: 1) Pemerintah Kalurahan Kedungpoh mengutamakan penyelenggaraan Pemerintahan yang bertanggung jawab dan senantiasa berorientasi pada perubahan yang lebih baik; 2) Pemerintah Kalurahan setempat juga berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat; 3) Kalurahan Kedungpoh juga mendorong adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakatnya terus berkembang ke arah yang lebih baik dan mampu mewujudkan kesejahteraannya; 4) Berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana umum guna memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam segala aspek; dan 5) Meningkatkan perekonomian Kalurahan melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi Kalurahan.

Menurut peneliti, jika semua ini dilaksanakan dan dikembangkan dengan baik, tentu akan memberikan dampak positif

bagi Kalurahan Kedungpoh guna mewujudkan kemajuan Kalurahan, daya saing, peningkatan ekonomi Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

b) Struktur Pemerintah Kalurahan

Bagan 2.1. Struktur Pemerintah Kalurahan Kedungpoh



(Sumber: Profil Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023)

Tabel 2.6. Daftar Perangkat Kalurahan Kedungpoh

| No. | Nama | Usia | Gender (L/P) | Pendidikan | Jabatan |
|-----|-----------------|------|--------------|------------|---|
| 1. | Dwiyono | 51 | L | SLTA | Lurah (Kepala Desa) |
| 2. | Ruslan Mudzakir | 49 | L | S1 | Carik (Sekretaris Desa) |
| 3. | Kolib Nurhidin | 35 | L | SLTA | Kaur Tata Laksana (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum) |
| 4. | Widada | 49 | P | D3 | Kaur Pangripta (Kepala Urusan Perencanaan) |
| 5. | Yusuf Efendi | 32 | P | S1 | Kaur Danarta (Kepala Urusan Keuangan) |
| 6. | Didik Purnomo | 40 | L | SLTA | Ulu-Ulu (Seksi Kesejahteraan) |
| 7. | Priyanto | 54 | L | S1 | Jagabaya (Seksi Pemerintahan) |
| 8. | Nuri Handoko | 41 | P | S1 | Kami Tuwa (Seksi Pelayanan) |
| 9. | Julius Giri | 51 | L | SLTA | Dukuh Gentungan |
| 10. | Srimuryani | 44 | P | SLTA | Dukuh Gojo |
| 11. | Sutejo | 39 | L | SLTA | Dukuh Kedungpoh Kidul |
| 12. | Sukarti | 46 | P | D3 | Dukuh Kedungpoh Kulon |
| 13. | Tri Marsudi | 53 | L | SLTA | Dukuh Kedungpoh Lor |
| 14. | Joko Sulardi | 58 | L | SLTA | Dukuh Kedungpoh Tengah |
| 15. | Tejo Suprapto | 43 | L | SLTA | Dukuh Klayar |
| 16. | Tri Astanto | 51 | L | D3 | Dukuh Mojosari |
| 17. | Iwan Suswanto | 38 | L | SLTA | Dukuh Nglorog |
| 18. | Suparman | 50 | L | SLTA | Dukuh Sinom |

(Sumber: Data Lapangan 2024)

Jika dilihat dari profil singkat pemerintah Kalurahan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa SDM pemerintah Kalurahan Kedungpoh mumpuni dengan jumlah 18 orang dan semua posisi di dalam struktur pemerintahan Kalurahan terisi. Disamping itu, secara tingkat pendidikan perangkat Kalurahan adalah lulusan SLTA/sederajat 11 orang, S1 4 orang dan D-III 3 orang. Sedangkan komposisi perangkat Kalurahan berdasarkan jenis kelamin yaitu didominasi oleh laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan 5 orang.

Kemudian secara usia juga semuanya masih dalam kategori usia produktif sehingga hal ini menjadi potensi yang baik dalam menjalankan kinerja pemerintahan di Kalurahan Kedungpoh.

Namun menurut peneliti, partisipasi kaum muda dalam struktur pemerintah Kalurahan Kedungpoh masih minim, dimana pada tabel 2.6 di atas menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 orang saja pemerintah Kalurahan Lumbungrejo yang berusia dibawah 40 tahun dan sisanya adalah 40 tahun ke atas. Menurut peneliti, pemuda-pemudi adalah aset masa depan bagi Desa/Kalurahan, sebab pemuda/pemudi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan.

2. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Tabel 2.7. Daftar Pengurus Badan Permusyawaratan Kalurahan

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|----------------|------------------|
| 1. | H. Wahyanto | Ketua |
| 2. | Suratih | Wakil Ketua |
| 3. | Nur Widiyah | Sekretaris |
| 4. | Dartono Wijaya | Ketua Bidang 1 |
| 5. | Hendra Suswono | Anggota Bidang 1 |
| 6. | Fardiyanto | Ketua Bidang 2 |
| 7. | Supardi | Anggota Bidang 2 |

(Sumber: Profil Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023)

Jika dilihat berdasarkan komposisi struktur organisasinya, maka Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kedungpoh sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena jumlah keanggotaannya ganjil yaitu 7 (tujuh) orang dan juga terdapat keterwakilan 2 orang perempuan. Selain itu, berdasarkan temuan peneliti, menunjukkan bahwa keanggotaan Bamuskal Kedungpoh juga berasal dari Padukuhan yang berbeda-beda. Sehingga hal ini sejalan

dengan ketentuan pada pasal 58 dalam UU Desa yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, partisipasi perempuan dan kemampuan keuangan Desa.

3. Badan Usaha Milik Kalurahan

Tabel 2.8. Daftar Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|----------------|---------------------|
| 1. | Andi Purwanto | Direktur |
| 2. | Rusdiyanto | Sekretaris |
| 3. | Wermina | Bendahara |
| 4. | Harmoko wijaya | Manajer Operasional |

(Sumber: Profil Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023)

Kalurahan Kedungpoh memiliki Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang disebut sebagai BUMKal “Murakabi”. Kemudian jika dilihat berdasarkan tabel di atas, juga menunjukkan bahwa BUMKal tersebut telah terlembagakan dengan dilengkapi pengurus yang mencakup Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan Manajer Operasional. Namun sayangnya, BUMKal Murakabi dalam perkembangannya saat ini belum mempunyai unit usaha sendiri, sehingga hanya sekedar mengakomodir pengembangan wisata Kalurahan yang hasilnya dibagi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat. Menurut peneliti, pemerintah Kalurahan Kedungpoh harus terus mendorong penguatan kelembagaan BUMKal, mengoptimalkan pengelolaan unit usaha dan pengelolaan aset-aset Kalurahan lainnya, serta manajemen programnya agar terus maju dan

dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) dan kesejahteraan masyarakat setempat.

4. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Tabel 2.9. Daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

| No. | Nama Lembaga | Jumlah Anggota |
|-----|---|----------------|
| 1. | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 36 orang |
| 2. | Tim Penggerak PKK | 33 orang |
| 3. | Karang Taruna | 48 orang |
| 4. | Kelompok Sadar Wisata | 20 orang |

(Sumber: Profil Kalurahan Kedungpoh Tahun 2023)

Dari tabel di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Karang Taruna dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), menunjukkan bahwa di Kalurahan Kedungpoh sudah terdapat beberapa lembaga/organisasi kemasyarakatan. Harapannya, dengan adanya lembaga kemasyarakatan tersebut juga mampu berkontribusi dalam proses pembangunan Kalurahan.

Menurut peneliti pemerintah Kalurahan perlu melakukan pembinaan, pemberdayaan, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mereka agar kedepannya lembaga-lembaga tersebut dapat membantu pemerintah Kalurahan Kedungpoh dalam menyukseskan setiap program dan kegiatan pembangunan di Kalurahan setempat. Sebab, dalam struktur kepengurusan lembaga-lembaga tersebut juga telah dilengkapi penanggung jawab di setiap bidang kegiatannya. Dimana bidang-bidang di dalam setiap lembaga tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

BAB III

PELEMBAGAAN LUMBUNG MATARAMAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KALURAHAN KEDUNGPOH

A. Pelembagaan Lumbung Mataraman

1. Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Lumbung Mataraman

Lumbung Mataraman sejatinya merupakan program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang secara pengelolaan dan pengembangannya kemudian dilimpahkan kepada pemerintah Kalurahan. Keberadaan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh itu sendiri telah diresmikan secara langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY pada Senin (04/12/23). Semenjak itu pula pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman menjadi kewenangan penuh pemerintah Kalurahan Kedungpoh.

Dalam hal ini, pemerintah Kalurahan Kedungpoh tidak hanya sekedar mendapatkan kewenangan dan mandatoris tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi DIY semata, namun juga mendapatkan kucuran dana dari Pemprov DIY. Berdasarkan temuan peneliti, besaran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) yang digelontorkan oleh Pemprov DIY untuk pengembangan program Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh yaitu sebesar Rp. 750.000.000 ribu rupiah. Berkaitan dengan hal ini, Ruslan Mudzakir

selaku Carik Kalurahan (Sekretaris Desa) Kedungpoh menyampaikan bahwa:

“Lumbung Mataraman di Kedungpoh itu sudah diresmikan oleh Gubernur itu sendiri pada bulan Desember tahun 2023 lalu. Untuk pengelolaan dan pengembangannya kita (pemerintah Kalurahan) dimodali dana sebesar 750 juta yang bersumber dari Danais. Tujuan dari program Lumbung Mataraman ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat, khususnya kepada KWT dan Gapoktan yang ada di Kedungpoh”.

Dari pernyataan di atas, telah menegaskan bahwa proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh menjadi kewenangan pemerintah Kalurahan setempat, yang disertai dengan dana sebesar 750 juta dari Pemprov DIY. Dengan demikian, dana tersebut akan dijadikan sebagai modal awal bagi pemerintah Kalurahan dan masyarakat setempat guna mengelola dan mengembangkan Lumbung Mataraman lebih lanjut, yang pada gilirannya dapat mewujudkan ketahanan pangan lokal khususnya di Kalurahan Kedungpoh. Karena Lumbung Mataraman bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal, maka tentu sangat membutuhkan peran pemerintah Kalurahan dan peran serta dari masyarakat setempat, khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai kelompok masyarakat yang erat kaitannya dengan sektor pertanian. Menurut peneliti, KWT dan Gapoktan tidak hanya diberdayakan tetapi juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengelolaan Lumbung Mataraman tersebut.

Terlepas dari peran pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan dan mendorong partisipasi aktif kelompok tani yang ada, dalam temuan

peneliti pemerintah Kalurahan juga memiliki peran dalam memanajemen, merencanakan, mengontrol pelaksanaan dan mengevaluasi jalannya Lumbung Mataraman secara berkelanjutan. Adapun peran pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman kemudian dipaparkan oleh Kolib Nurhidin selaku Kaur Tata Laksana dan sekaligus sebagai pengelola Lumbung Mataraman, yakni:

“Kalau bicara mengenai peran PemKal, yang jelas dari pihak Kalurahan itu melakukan pembinaan, pendampingan dan memfasilitasi. Karena Lumbung Mataraman berada di bawah naungan pemerintah Kalurahan, makanya saat ini bahkan Pamong Kalurahan juga terlibat langsung dalam pengelolaannya”.

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Kedungpoh turut serta dalam pengelolaan Lumbung Mataraman, memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pendampingan guna kelancaran proses pengembangan Lumbung Mataraman tersebut. Berdasarkan temuan peneliti lebih lanjut menunjukkan bahwa: *pertama*, peran pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan Lumbung Mataraman yaitu sebagai penanggung jawab. Dimana pada konteks ini yang menjadi Direktur Lumbung Mataraman merupakan pemerintah Kalurahan itu sendiri, yaitu Didik Purnomo yang saat ini sedang menjabat sebagai Kasi Ulu-Ulu (Kepala Seksi Kesejahteraan) Kalurahan Kedungpoh dan sekaligus menjadi Direktur Lumbung Mataraman. Sedangkan Lurah pada konteks ini menjadi pembina atau pelindung di dalam kelembagaan Lumbung Mataraman. Disamping itu, beberapa perangkat Kalurahan juga menjadi pengelola aktif di dalam Lumbung Mataraman tersebut. Dengan demikian, maka hal ini memungkinkan adanya peran pemerintah Kalurahan dalam

keseluruhan proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman, mulai dari tahap perencanaan hingga pada evaluasi program.

Kedua, peran fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Lumbung Mataraman yaitu meliputi: 1) Permodalan, dimana pada saat ini pemerintah Kalurahan juga telah menganggarkan 20% dari Dana Kalurahan yaitu sebesar 110 juta pada tahun berjalan (2024) untuk pengembangan Lumbung Mataraman tersebut. 2) Pemerintah Kalurahan juga memfasilitasi lahan, dimana lahan yang dikelola dalam Lumbung Mataraman saat ini merupakan tanah kas Kalurahan Kedungpoh itu sendiri atas persetujuan Panitikismo (Lembaga Pertanahan Keraton Yogyakarta atau Sultan *Ground*). 3) Fasilitasi pemerintah Kalurahan juga melalui kerjasama dengan lembaga/dinas terkait, dimana pada saat ini telah menjalin kerjasama dengan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) agar secara intens melakukan pelatihan dan penyuluhan di Lumbung Mataraman; kemudian bekerja sama juga dengan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan baik dinas di tingkat Kabupaten Gunungkidul maupun Provinsi DIY; selain itu juga bekerjasama dengan perguruan tinggi, yaitu salah satunya dengan Fakultas Pertanian UGM guna pengembangan teknologi pertanian dan riset. Dan, 4) Pemerintah Kalurahan juga memfasilitasi beberapa sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan di dalam Lumbung Mataraman seperti infrastruktur jalan dan peralatan pertanian serta memfasilitasi beberapa kebutuhan kelompok tani.

Ketiga, pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola Lumbung Mataraman juga merupakan peran dan tanggung jawab pemerintah Kalurahan. Dimana pada konteks ini pemerintah Kalurahan juga turut mengarahkan, memotivasi dan memberikan *support* baik secara moril dan materil kepada semua pengelola Lumbung Mataraman di dalamnya, yaitu meliputi beberapa perangkat Kalurahan, KWT dan Gapoktan. Peran pemerintah Kalurahan dalam konteks ini merupakan proses pengorganisasian masyarakat, terutama kelompok tani dari setiap padukuhan agar terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman. Disamping itu, pemerintah Kalurahan juga berperan untuk mendeteksi dan mengendalikan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di dalam Lumbung Mataram, serta memastikan agar proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

2. Sistem Pengelolaan Lumbung Mataraman

Sebagaimana yang sudah peneliti uraikan sebelumnya, bahwa pengelolaan Lumbung Mataraman Kedungpoh yaitu berada di bawah kontrol langsung pemerintah Kalurahan setempat, dimana salah satu dari perangkat Kalurahan (Kasi Ulu-Ulu) menjabat sebagai direktur dan Lurah sebagai pelindung/pembina di dalam Lumbung Mataraman. Disamping itu, secara pengelolaannya juga bersifat kolaboratif dengan melibatkan peran serta kelompok-kelompok tani yang ada di Kalurahan Kedungpoh. Berkaitan dengan proses pengelolaan Lumbung Mataraman, Didik

Purnomo selaku Kasi Ulu-Ulu dan sekaligus Direktur Lumbung Mataraman Kedungpoh menerangkan bahwa:

“Konsep pengelolaan Lumbung Mataraman di Kedungpoh ini yaitu mengadopsi konsep pertanian semi modern dengan sistem pertanian terpadu. Kemudian dalam pengelolaannya juga bersifat kolaboratif yang melibatkan pemerintah Kalurahan dan kelompok tani. Kalau secara permodalan itu awalnya dari Danais, yang nantinya hasil dari itu kita kembangkan lagi sebagai modal. Tapi selain dari Danais, Pemkal juga membantu modal awalnya”.

Sejalan dengan itu, Ruslan Mudzakir selaku Carik Kalurahan Kedungpoh juga menerangkan lebih lanjut perihal sistem pengelolaan Lumbung Mataraman, yakni:

“Kalau mengenai sistem produksi dan distribusi hasil dari Lumbung Mataraman saat ini masih dalam lingkup Kalurahan saja. Tapi jika ini terus berkembang, maka kedepannya bisa saja komoditas dari Lumbung Mataraman ini dieksport ke luar. Sedangkan mengenai pembagian hasil, intinya itu 10% dari hasilnya masuk ke kas Lumbung Mataraman dan sisanya lagi untuk yang bekerja”.

Dari pernyataan kedua narasumber di atas, maka dapat peneliti simpulkan mengenai konsep pengelolaan Lumbung Mataraman yaitu secara umum meliputi: 1) Sistem Pertanian Terpadu; 2) Sistem Kerja Kolaboratif; 3) Sistem Produksi, Distribusi dan Bagi Hasil; dan 4) Sistem Permodalan dan Pengelolaan Keuangan. Adapun temuan peneliti mengenai keempat konsep dalam pengelolaan Lumbung Mataraman tersebut akan peneliti uraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pertama, Sistem Pertanian Terpadu. Temuan peneliti lebih lanjut menunjukkan bahwa sistem pertanian terpadu yang dimaksudkan dalam pengelolaan Lumbung Mataraman yaitu berkaitan dengan perpaduan dan keterhubungan antara sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Untuk

sektor pertanian, saat ini Lumbung Mataraman telah mengembangkan komoditas pangan berupa aneka sayuran (bayam, kangkung, sawi, kol, dll), cabe, bawang merah, singkong, kacang, timun, anggur, lemon, strawberry, markisa dan lain sebagainya yang dapat disesuaikan berdasarkan musim dan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan di sektor peternakan, saat ini terdapat 5 ekor sapi yang dipelihara di dalam Lumbung Mataraman, dengan tujuan bahwa kotoran sapi tersebut dapat diolah dan difungsikan sebagai pupuk organik guna memenuhi kebutuhan pupuk tanaman pangan yang dikembangkan tersebut. Sementara di sektor perikanan, saat ini Lumbung Mataraman melakukan budidaya ikan nila, dimana kolam ikan nila tersebut juga merupakan tempat penampungan air yang dibutuhkan untuk menyirami tanaman pangan yang ada di dalam Lumbung Mataraman itu sendiri.

Menurut peneliti, konsep pertanian terpadu yang demikian sangat bagus untuk dikembangkan lebih lanjut, karena masyarakat tidak hanya mendapatkan hasil dari tanaman pangan semata, tetapi juga menghemat pengeluaran untuk biaya pupuk dan pengendalian hama melalui produksi pupuk sendiri dari kotoran dan urin sapi tersebut. Dalam temuan peneliti, produksi pupuk organik tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Lumbung Mataraman, tetapi jika lebih dapat pula dijual guna menambah pendapatan ekonomi. Begitu juga dengan proses budidaya ikan nila yang setiap 4-5 bulan akan dipanen dan dapat pula dijual ke masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Kedua, Sistem Kerja Kolaboratif. Berdasarkan temuan peneliti, kerja kolaboratif yang dimaksudkan pada konteks ini yaitu berkaitan dengan pengelola Lumbung Mataraman yang tidak hanya terdiri dari pemerintah Kalurahan, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat terutama kelompok tani itu sendiri. Kalurahan Kedungpoh memiliki 10 Padukuhan, dimana setiap Padukuhan memiliki kelompok taninya masing-masing, baik itu kelompok tani yang beranggotakan petani laki-laki/bapak-bapak maupun kelompok wanita tani yang beranggotakan perempuan/ibu-ibu. Menurut peneliti, antusiasme dan kolektivitas antara anggota kelompok tani dari masing-masing Padukuhan dengan pemerintah Kalurahan dalam proses pengelolaan Lumbung Mataraman, pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas pangan guna mewujudkan ketahanan pangan di Kalurahan Kedungpoh secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan sistem kerja dalam proses pengelolaan Lumbung Mataraman, juga disampaikan oleh Heni Putriani selaku Ketua Kelompok Wanita (KWT) Mekar sekaligus mengelola aktif di Lumbung Mataraman, yakni:

“Sistem kerjanya sederhana saja. Misalnya, saat pembukaan lahan dan penanaman atau panen itu biasanya melibatkan semua anggota. Pokoknya tergantung apakah yang ditanam dan yang dipanen itu banyak atau tidak, jika banyak pasti melibatkan semua anggota kelompok. Sedangkan untuk pemeliharaan tanaman sehari-hari itu kita sistem piket, kalau di KWT Mekar itu kami menentukan 5 orang yang piket dalam satu hari dan untuk hari berikutnya 5 orang lainnya lagi. Jadi ini di *rolling* selama satu minggu, dimana setiap anggota mendapat jadwal 1 hari kerja dalam satu minggu”.

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa sistem kerja di Lumbung Mataraman bersifat fleksibel karena pada momen tertentu

membutuhkan tenaga yang banyak, sedangkan untuk pemeliharaan tanaman pada hari-hari biasanya menggunakan sistem piket. Dimana jumlah dan jadwal piket dari setiap anggota kelompok ditentukan oleh masing-masing kelompok, yang pada intinya setiap anggota mendapatkan jadwal piket satu kali dalam satu minggu. Sedangkan momen-momen yang membutuhkan keterlibatan banyak orang ini biasanya pada saat pembukaan lahan untuk program penanaman baru atau saat panen beberapa komoditas tertentu.

Dalam temuan peneliti lebih lanjut, mekanisme kerja yang demikian berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Lumbung Mataraman. Sebab, baik perangkat Kalurahan maupun kelompok tani—terutama dalam hal ini Kelompok Wanita Tani (KWT) dari setiap Padukuhan juga diberikan lahan untuk dikelola masing-masing. Sehingga manajemen dan sistem kerja di dalamnya dapat diatur sendiri oleh masing-masing kelompok tersebut. Hal ini pada gilirannya berlaku juga dalam proses produksi, distribusi dan pembagian hasil di dalam Lumbung mataraman.

Ketiga, Sistem Produksi, Distribusi dan Bagi Hasil. Dalam temuan peneliti, sistem produksi, distribusi dan bagi hasil secara umum dilimpahkan kepada masing-masing kelompok yang terlibat di dalam Lumbung Mataraman. Namun setiap kelompok pengelola wajib menyertakan 10% penghasilannya per panen ke kas Lumbung Mataraman. Berkaitan dengan hal ini, kemudian diutarakan juga oleh Iwan Suswanto

selaku Dukuh Nglorog dan sekaligus pengelola Lumbung Mataraman, yakni:

“Untuk produksi, jenis tanaman yang akan dibudidayakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok. Tapi secara umum komoditas pangan yang dikembangkan disini itu berupa jenis tanaman hortikultura. Sedangkan untuk distribusi hasil, jika hasilnya lebih maka setiap kelompok akan menjualnya. Biasanya masyarakat yang datang langsung untuk membeli di Lumbung. Kalau bagi hasil, itu minimal 10% dari hasil per panen setiap kelompok masuk dalam kas Lumbung”.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Komoditas pangan yang diproduksi di Lumbung Mataraman secara umum merupakan tanaman hortikultura yang jenis tanamannya dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing kelompok pengelola. 2) Proses distribusi hasil pangan untuk saat ini masih dijual dalam lingkup masyarakat Kalurahan Kedungpoh dan sekitarnya yang datang membeli langsung di lokasi. Namun prioritas utamanya saat ini yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga anggota kelompok tani terlebih dahulu terutama yang berkaitan dengan kebutuhan sayur-mayur, dan jika hasilnya lebih barulah dijual ke masyarakat lainnya dengan harga yang lebih terjangkau. 3) pembagian hasil yang dimaksud yaitu setiap komoditas yang dipanen oleh setiap kelompok wajib memberikan 10% untuk pemasukan kas Lumbung Mataraman. Hal ini dikarenakan lahan Lumbung Mataraman yang dikelola oleh masyarakat merupakan tanah kas Desa, dimana bagi hasil 10% tersebut juga untuk menambah modal dalam pengembangan Lumbung Mataraman lebih lanjut kedepannya.

Keempat, Sistem Permodalan dan Pengelolaan Keuangan. Pada konteks ini, modal awal dalam pengembangan Lumbung Mataraman

diperoleh dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) dari Pemprov DIY sebesar 750 juta. Modal lainnya juga diperoleh dari Dana Kalurahan, dimana pada tahun 2024 ini pemerintah Kalurahan Kedungpoh menganggarkan 110 juta untuk Lumbung Mataraman yang bagian dari 20% pos anggaran ketahanan pangan Kalurahan. Dalam temuan peneliti, modal yang diperoleh Lumbung Mataraman Kedungpoh baik dari Pemprov DIY maupun dari pemerintah Kalurahan setempat, semuanya hanya bersifat modal awal. Namun untuk tahun-tahun berikutnya, diharapkan bahwa Lumbung Mataraman secara kelembagaan dapat mandiri, baik secara modal maupun dalam memanajemen dan mengelola sistem keuangannya sendiri.

Perihal sistem pengelolaan keuangan di Lumbung Mataraman Kedungpoh, temuan peneliti menunjukkan bahwa modal yang telah diperoleh tersebut kemudian digunakan baik untuk pembangunan sarana prasarana dan pengadaan fasilitas-fasilitas penunjang guna kebutuhan pengembangan Lumbung Mataraman itu sendiri. Selain itu, sebagian modal juga telah digunakan baik untuk pembukaan lahan dan pembibitan di sektor pertanian, pembelian sapi 5 ekor di sektor peternakan dan pembibitan ikan nila di sektor perikanan, maupun untuk biaya operasional dalam proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, menunjukkan bahwa sekitar 60-80% dari modal awal tersebut telah dibelanjakan atau terpakai untuk pemenuhan berbagai kebutuhan dan perlengkapan dalam proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman. Berkaitan

dengan hal ini, Didik Purnomo selaku Direktur Lumbung Mataraman Kedungpoh dan sekaligus sebagai Kasi Ulu-Ulu Kalurahan setempat menyampaikan bahwa:

“Kalau ditotalkan, keseluruhan modal awal yang diperoleh Lumbung Mataraman yaitu sebesar 860 juta. Dari Pemprov DIY sebanyak 750 juta dan dari Pemkal sendiri 110 juta. Sekitar 60-80% dari modal ini sudah kita gunakan untuk pembangunan Lumbung Mataraman. Karena proses pengembangan Lumbung Mataraman di Kedungpoh saat ini masih pada tahap awal, sehingga dana yang ada memang lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik, lalu untuk pembiayaan yang menunjang program pertanian terpadu dan pengadaan fasilitas pendukung lainnya”.

Menurut peneliti, sistem pengelolaan keuangan Lumbung Mataraman Kedungpoh saat ini sudah tepat sasaran. Sebagai contoh, modal awal yang diperoleh tersebut telah digunakan untuk menunjang berbagai proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman itu sendiri, yaitu mulai dari pembangunan fisik hingga pengembangan program sistem pertanian terpadu di dalamnya. Sebab, saat ini Lumbung Mataraman tersebut masih dalam tahap awal pembangunan dan pengembangan. Bahkan dalam temuan peneliti di lapangan, sebagian pembangunan fisik seperti pembukaan jalan ke lahan pertanian, pembuatan irigasi dan pembangunan *green house* masih terus berlanjut hingga saat ini. Disamping itu, Lumbung Mataraman juga memfasilitasi berbagai bibit tanaman bagi setiap KWT yang ada untuk ditanami di lahannya masing-masing di dalam kawasan Lumbung Mataraman.

Namun sembari membangun, Lumbung Mataraman juga sudah mulai memproduksi dan melaksanakan usaha pertanian terpadunya. Sehingga hasil dari itu dapat menambah pemasukan untuk kas Lumbung

Mataraman tersebut. Menurut peneliti, meskipun masih dalam tahap awal pembangunan dan telah memakan biaya yang cukup besar, disamping itu Lumbung Mataraman juga sudah mampu memperoleh pendapatan atau pemasukan dari sistem bagi hasil, yaitu 10% per panen yang diterapkan dalam proses pengelolaan usaha pertanian terpadu tersebut. Hal ini berarti bahwa jika semua pembangunan dalam tahap awal ini sudah selesai, pihak manajemen Lumbung Mataraman juga masih memiliki sisa modal awal setidaknya paling sedikit 25% dari 860 juta, yaitu sekitar 215 juta. Sehingga sisa modal awal tersebut dan ditambah dengan pemasukan dari keseluruhan hasil panen per tahun 2024 ini, maka Lumbung Mataraman Kedungpoh masih memiliki modal yang cukup untuk pengelolaan dan pengembangan pada tahap-tahap berikutnya.

Dengan demikian, apabila proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh ini berjalan lancar dan semakin maju, maka hal ini tidak hanya menambah omset pemasukan bagi kas Lumbung Mataraman semata, tetapi juga menambah pendapatan ekonomi masyarakat setempat yang turut terlibat dalam pengelolaan Lumbung Mataraman tersebut. Selain itu, apabila sistem keuangannya dapat dikelola dengan baik dan omsetnya terus meningkat kedepannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa secara keuangan Lumbung Mataraman juga dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Kalurahan/Desa (PADesa) setempat.

3. Pogram Pengembangan Lumbung Mataraman

Meskipun masih dalam tahap pembangunan awal karena baru dimulai pada akhir tahun 2023, Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh saat ini sudah mulai mengembangkan beberapa program dan usahanya. Berkaitan dengan program yang sedang dikembangkan di Lumbung Mataraman Kedungpoh untuk tahun 2024 ini kemudian paparkan lebih lanjut oleh Didik Purnomo selaku direktur Lumbung Mataraman dan Ulu-Ulu Kalurahan Kedungpoh, yakni:

“Mengenai program yang dikembangkan itu antara lain terkait dengan sistem pertanian terpadu itu sendiri yang dalam penerapannya yaitu budidaya tanaman hortikultura, produksi pupuk organik, pembibitan dan budidaya ikan wader pari, dan wisata edukasi. Tapi pengembangan tersebut untuk saat ini belum mempunyai target ekonomi, karena masih pada tahap uji coba, belajar dan pelatihan”.

Berangkat dari pernyataan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa secara umum terdapat empat program pengembangan Lumbung Mataraman pada tahun 2024, yaitu meliputi: 1) Budidaya Tanaman Hortikultura; 2) Produksi Pupuk Organik; 3) Pembibitan dan Budidaya Ikan Nila dan Wader Pari; dan 4) Wisata Edukasi. Adapun temuan peneliti lebih lanjut perihal keempat program pengembangan Lumbung Mataraman Kedungpoh tersebut, akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pertama, Budidaya Tanaman Hortikultura. Salah satu fokus Lumbung Mataraman Kedungpoh di sektor pertanian saat ini yaitu pengembangan budidaya tanaman hortikultura. Berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, tujuan membudidayakan tanaman hortikultura yaitu selain karena masa panennya yang lebih cepat, juga untuk menghasilkan sayur-mayur dan buah-buahan guna memenuhi kebutuhan

pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Adapun komoditas yang saat ini telah dikembangkan di Lumbung Mataraman Kedungpoh yaitu meliputi: aneka sayuran (bayam, kangkung, sawi, buncis, kacang panjang, pare, kol, dll), cabe, tomat, bawang merah, wortel, singkong, kacang tanah, timun, anggur, lemon, strawberry, markisa dan lain sebagainya yang dapat disesuaikan berdasarkan musim dan kebutuhan masyarakat setempat.

Berkaitan dengan upaya pengembangan tanaman hortikultura, hal ini disampaikan juga oleh Heni Putriani selaku Ketua KWT Mekar dan sekaligus pengelola Lumbung Mataraman, yakni:

“Jadi fokus Lumbung Mataraman untuk saat ini memang lebih ke tanaman hortikultura, khususnya tanaman sayur-mayur. Karena lahan yang dikelola sekarang juga masih terbatas dan ketersediaan air juga belum mumpuni. Sementara tanaman horti tersebut dia tidak terlalu membutuhkan air yang banyak, perawatan lebih mudah dan panennya juga cepat”.

Menurut peneliti, tanaman hortikultura sebagai metode budidaya pertanian modern tersebut memang cocok untuk diterapkan di Lumbung Mataraman tersebut. Sebab sayur-mayur dan buah-buahan merupakan komoditas yang selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Selain itu, karena masa panennya yang cepat, hal ini juga akan lebih cepat menjawab kebutuhan pangan masyarakat dan mempercepat pendapatan para petani yang mengelola lahan di Lumbung Mataraman tersebut. Sebab, hasil panen tanaman tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga dapat dijual.

Berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, semenjak dikembangkannya Lumbung Mataraman tersebut, Kelompok Wanita Tani

dan pengelola Lumbung Mataraman lainnya sudah melakukan penanaman tahap pertama pada bulan April 2024. Alhasil, pada kurun waktu bulan Mei hingga Juni 2024 ini sudah melakukan beberapa kali panen tanaman sayuran. Saat ini juga para pengelola Lumbung Mataraman sedang melakukan pembibitan di green house untuk persiapan penanaman tahap kedua pada bulan Juli 2024. Sejalan dengan itu, Iwan Suswanto selaku Pengelola Lumbung Mataraman dan Dukuh Ngolorok menyatakan bahwa:

“Untuk panen kemarin (bulan Juni 2024) lumayan juga hasilnya, tapi lebih banyak masih untuk dikonsumsi sendiri. Lalu sekarang ini lagi proses persiapan lahan dan pembibitan lagi untuk penanaman periode kedua yang rencananya akan dimulai lagi pada bulan Juli (2024) ini”.

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa hasil pada tahap pertama cukup memuaskan, sekalipun sebagian besar dari hasil pangan tersebut masih untuk dikonsumsi sendiri oleh keluarga tani pengelola Lumbung Mataraman itu sendiri. Hasil yang telah dinikmati tersebut kemudian memotivasi dan membuat masyarakat yang terlibat di dalam pengelolaan Lumbung Mataraman semakin berantusias untuk melakukan penanaman pada tahap-tahap berikutnya.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, komoditas pangan tersebut untuk saat ini memang belum dijualkan ke pasar, tetapi terdapat banyak juga masyarakat lainnya yang datang langsung ke lokasi untuk membeli sayur mayur tersebut. Melihat potensi pasar tersebut, hal ini juga memicu para pengelola Lumbung Mataraman untuk melakukan pengembangan usaha pertanian hortikultura lebih lanjut kedepannya. Sebab, tanah kas desa yang disediakan untuk pengembangan Lumbung

Mataraman yaitu seluas 10 Hektar (Ha), sementara yang baru terpakai pada tahap pengembangan awal sekarang ini baru seluas 2 Ha. Artinya, masih terdapat 8 Ha lagi yang dapat dimanfaatkan kedepannya dalam proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman kedepannya.

Untuk itu, saat ini pun telah tersedia alat/mesin olahan pangan terutama untuk pengolahan cabe, bayam, tomat, bawang, kacang tanah dan singkong di Lumbung Mataraman. Alat/mesin olahan tersebut merupakan fasilitas penunjang dalam pengembangan Lumbung Mataraman lebih lanjut kedepannya. Adapun hasil pangan yang sudah diolah pada saat ini yaitu singkong dan cabe, dimana singkong diolah menjadi keripik dan cabe diolah menjadi sambal. Namun proses olahan dua jenis komoditas tersebut masih dalam konteks pelatihan dan percontohan sehingga belum memberi penghasilan ekonomis. Tetapi hal ini telah menunjukkan bahwa produksi pangan yang dilakukan kedepannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik keluarga tani, tetapi juga untuk menghasilkan produk-produk olahan yang dapat dijual guna meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kedua, Produksi Pupuk Organik. Sebagaimana peneliti telah singgung sebelumnya, bahwa pengembangan sistem pertanian terpadu juga meliputi sektor peternakan di dalamnya. Di Lumbung Mataraman saat ini telah membudidayakan lima ekor sapi, dengan tujuan bahwa kotoran (kotoran padat, urin dan sisa makan) sapi tersebut dapat diolah menjadi Pupuk Kandang dan Pupuk Organik Cair (POC). Adapun manfaat dari produksi pupuk organik tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan pupuk

tanaman pangan yang ada di Lumbung Mataraman Kedungpoh itu sendiri. Sejalan dengan itu, Julius Giri selaku Dukuh Gentungan juga mengungkapkan hal serupa bahwa:

“Untuk produksi pupuk organik, saat ini memang sudah mulai berjalan seperti pembuatan kompos dari kotoran sapi dan fermentasi urin sapi untuk menghasilkan POC. Tapi semua itu masih pada tahap latihan dan percontohan kepada semua kelompok tani dan pengelola Lumbung Mataraman, yang di dampingi langsung oleh pihak dari BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Nglipar melalui PPL (Penyuluhan Pertanian Lapangan) yang bertugas di Kalurahan Kedungpoh.”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa proses pengomposan kotoran sapi dan fermentasi urin sapi sudah dilakukan, dimana kotoran sapi tersebut untuk menghasilkan pupuk kompos dan fermentasi urin sapi untuk menghasilkan pupuk organik cair. Namun, proses produksi pupuk tersebut untuk saat ini masih pada tahap pelatihan dan percontohan, yang mana hasilnya hanya untuk digunakan pada tanaman pangan masyarakat yang ada di dalam Lumbung Mataraman Kedungpoh itu sendiri.

Pandangan peneliti terkait dengan produksi pupuk tersebut adalah bahwa selain untuk menghasilkan pupuk guna kebutuhan tanaman di Lumbung Mataraman, tapi melalui kegiatan pelatihan dan percontohan tersebut—maka hal ini telah mengajarkan dan memberdayakan petani dan masyarakat setempat—agar kedepannya masyarakat dapat pula memproduksi pupuk organik sendiri guna meminimalisir pengeluaran biaya pupuk itu sendiri dan mengurangi ketergantungannya pada pupuk-pupuk kimia/sintesis. Sebab, dalam proses pembuatan Pupuk Kompos dan POC tersebut juga melibatkan semua kelompok tani yang ada dan dampingi langsung oleh pihak Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Nglipar

melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ahli dan profesional di bidangnya.

Oleh karenanya, menurut peneliti, program pengembangan Lumbung Mataraman melalui produksi pupuk organik tersebut sangat memberdayakan masyarakat setempat. Sebab ilmu yang diperoleh dari kegiatan pelatihan, percontohan dan produksi pupuk organik di Lumbung Mataraman tersebut dapat pula dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat setempat, khususnya para petani baik secara individu maupun dengan kelompok taninya guna memenuhi kebutuhan pupuk di lahan pertanian mereka masing-masing. Disamping itu, temuan peneliti juga menunjukkan bahwa produksi pupuk tersebut memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga manfaatnya tidak hanya untuk mengedukasi masyarakat setempat dan memenuhi kebutuhan pupuk di Lumbung Mataraman, namun dapat pula di jual untuk menambah pemasukan kas Lumbung Mataraman itu sendiri guna pengembangan usaha lebih lanjut kedepannya. Dengan demikian, hasil pengembangan Lumbung Mataraman kedepannya juga dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Kalurahan/Desa (PAKal/PADesa) dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat.

Ketiga, Pembibitan dan Budidaya Ikan Nila dan Wader Pari.
Dalam hal pengembangan di sektor perikanan, temuan peneliti menunjukkan bahwa saat ini Lumbung Mataraman sedang melakukan budidaya ikan nila. Bahkan hasil dari budidaya ikan nila tersebut sudah pada tahap satu kali panen pada bulan Mei 2024 lalu. Temuan peneliti juga

menunjukkan bahwa nampaknya pengelola Lumbung Mataraman Kedungpoh berupaya untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Hal ini disampaikan oleh Suyanti selaku ketua KWT Lantip Makarti sekaligus pengelola Lumbung Mataraman Kedungpoh bahwa:

“Saat ini kan cuman ikan nila yang di budidayakan dan itupun masih cuman satu kolam. Jadi sudah dibahas juga bahwa rencana selanjutnya dalam tahun 2024 ini untuk menambah kolam ikan nila dan jika memungkinkan masing-masing KWT mendapatkan bagian satu kolam. Selain itu, pada bulan Agustus nanti ada kerja sama dengan kampus UGM untuk melakukan pembibitan dan budidaya ikan wader pari”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 ini ada upaya untuk mengembangkan budidaya ikan nila, yang rencananya akan menambah kolam ikan nila agar setiap KWT juga mendapatkan bagian masing-masing satu kolam. Selain itu, pada bulan Agustus 2024 juga akan meresmikan program pembibitan dan budidaya ikan wader pari melalui kerjasama dengan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Menurut peneliti, upaya ini dimungkinkan karena lahan untuk pengembangan Lumbung Mataraman kedungpoh itu sendiri masih banyak tersedia dan modal juga masih mencukupi.

Lebih lanjut, Menurut peneliti, rencana penambahan kolam ikan nila bagi setiap KWT tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Sehingga pendapatan para anggota KWT dan pengelola lainnya akan terus bertambah, karena pendapatan mereka tidak hanya dari produksi tanaman pangan tetapi juga dari hasil budidaya ikan nila itu sendiri. Disamping itu, pemasukan kas Lumbung Mataraman juga diharapkan akan semakin meningkat karena memperoleh pembagian hasil

10% per panen dari hasil budidaya ikan nila dan wader pari tersebut. Dengan demikian, peneliti berpandangan bahwa kebutuhan pangan rumah tangga tani secara bertahap akan terpenuhi dan dilain sisi pendapatan mereka juga akan semakin bertambah. Sedangkan melalui pemasukan kas Lumbung Mataraman yang akan terus bertambah tersebut, memungkinkan adanya pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman lebih lanjut kedepannya guna mewujudkan ketahanan pangan lokal di Kalurahan Kedungpoh itu sendiri.

Keempat, Wisata Edukasi. Sektor pariwisata juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengembangan konsep Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh yang bersifat multi sektor, yaitu meliputi sektor pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata. Dalam hal pengembangan di sektor pariwisata, temuan peneliti menunjukkan bahwa Lumbung Mataraman beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya dapat menjadi bahan percontohan bagi masyarakat umum, khususnya bagi pelajar/mahasiswa dan praktisi yang konsen di bidang sistem pertanian terpadu. Berkaitan dengan upaya pengembangan wisata edukasi, juga dituturkan oleh Ruslan Mudzakir selaku Carik Kalurahan Kedungpoh, yakni:

“Jika proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman ini sukses, berjalan lancar dan maju, maka dengan sendirinya akan mengarah pada wisata edukasi. Karena tujuan kami dari pemerintah Kalurahan pun demikian. Jada kedepannya, ketika ada yang berkunjung ke lumbung itu tidak hanya menikmati keindahannya tetapi juga memperoleh ilmu yang sangat berharga, karena mereka bisa mencontohi apa yang diterapkan di lumbung itu”.

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa dari pihak pemerintah Kalurahan sendiri juga menghendaki agar Lumbung Mataraman dapat menjadi *spot/ikon* wisata edukasi di Kalurahan Kedungpoh. Menurut peneliti, rencana tersebut sangat mungkin terwujud dikarenakan proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman saat ini mengalami peningkatan mulai dari skala pembibitan dan budidaya, produksi, pengadaan sarana prasarana dan fasilitas penunjang lainnya. Karenanya, saat ini sarana prasarana dan fasilitas pendukung untuk wisata edukasi pun sedang disiapkan mulai dari papan informasi, petunjuk arah, infrastruktur berupa jalan-jalan kecil untuk mempermudah akses para pengunjung dan dapat mengelilingi semua spot di dalam Lumbung Mataraman.

Dalam hal ini, keberhasilan Lumbung Mataraman Kedungpoh secara kelembagaan dalam mengelola dan mengembangkan setiap usaha yang ada di dalamnya, tentu akan menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung di lokasi tersebut. Menurut peneliti, orang-orang bahkan tidak hanya datang untuk berwisata, tetapi juga untuk tujuan belajar dan sembari itu mereka dapat pula membeli produk-produk yang tersedia di dalam Lumbung Mataraman tersebut. Lebih lanjut, hal ini juga membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat seperti jasa parkiran, pembukaan kantin atau lapak bagi pelaku UMKM setempat, menciptakan lapangan pekerjaan karena membutuhkan tenaga tambahan yang spesifik mengelola wisatanya dan memberikan edukasi pertanian kepada pengunjung yang hendak belajar. Sehingga hal ini berpeluang untuk menambah pendapatan masyarakat setempat dan pemasukan bagi Lumbung Mataraman itu

sendiri. Dengan demikian, peneliti berpandangan bahwa melalui pengembangan wisata edukasi tersebut, pada gilirannya dapat memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat setempat.

4. Partisipasi Kelompok Tani

Sebagaimana yang peneliti sudah singgung di bagian latar belakang dan pada pembahasan sebelumnya di atas, bahwa konsep pengembangan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh tidak lain yaitu bersifat swadaya, yang dalam hal ini menekankan adanya partisipasi dari kelompok tani setempat pada umumnya dan terlebih khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT) dari setiap Padukuhan di Kalurahan Kedungpoh. Hal ini sejalan dengan amanat dari Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY saat menggelar peresmian Lumbung Mataraman di Kedungpoh pada bulan Desember 2023 lalu.

Berdasarkan temuan peneliti, alasan memprioritaskan partisipasi KWT yaitu untuk memberdayakan kelompok perempuan atau ibu-ibu dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan mereka. Berkaitan dengan hal ini, dipaparkan oleh Suyanti selaku ketua KWT Lantip Makarti sekaligus pengelola Lumbung Mataraman bahwa:

“Sedari awal perencanaannya memang semua kelompok dan khususnya KWT sudah disosialisasikan oleh pemerintah Kalurahan bahwa pengelolaan lumbung ini kedepannya akan dikelola bersama melalui swadaya masyarakat. Tapi memang KWT-KWT itu yang lebih diberi perhatian khusus supaya terlibat aktif di lumbung”.

Sejalan dengan itu, alasan lain mengenai prioritas terhadap KWT juga diterangkan lebih lanjut oleh Heni Putriani selaku ketua KWT Mekar dan sekaligus pengelola Lumbung Mataraman, yakni:

“Sebenarnya tidak menutup kemungkinan jika gabungan kelompok tani (Gapoktan) termasuk kelompok tani yang anggotanya laki-laki atau bapak-bapak itu turut terlibat. Makanya saat pembukaan lahan untuk pembibitan dan penanaman tanaman itu para suami atau bapak-bapak juga datang membantu kami yang KWT. Jadi lebih pada pembagian kerja di rumah tangga keluarga petani masing-masing”. Kalau yang perempuan atau ibu-ibu menanam sayur di pekarangan rumah dan di lumbung, sedangkan yang laki-laki atau bapak-bapak ini fokus mengelola lahan pertanian/perkebunan keluarganya seperti untuk tanam padi atau jagung dan sebagainya”.

Dari pernyataan kedua narasumber di atas, dapat penulis simpulkan bahwa semenjak perencanaan pembangunan Lumbung Mataraman tersebut sudah menitikberatkan pada KWT dari setiap Padukuhan merupakan pihak yang dapat mengelola lahan di dalamnya. Disamping itu, prioritas terhadap KWT ini juga merupakan bagian dari program pemberdayaan keluarga tani, guna menciptakan usaha sampingan di luar dari usaha keluarganya di lahan pribadi masing-masing. Apalagi usaha pertanian yang dikembangkan di Lumbung Mataraman tersebut merupakan tanaman sayur-mayur, sehingga hal ini juga dirasa cocok untuk dikerjakan oleh para ibu-ibu saja, sedangkan para bapak-bapak mengurus sawah seperti tanaman padi atau kebun seperti tanaman jagung dan lain sebagainya yang dianggap lebih cocok untuk pekerjaan laki-laki.

Namun menurut peneliti, pembagian kerja yang demikian bukan berarti untuk mendiskriminasi jenis gender tertentu, mengamini ketimpangan gender dan justru mencederai adanya kesetaraan gender

antara laki-laki dan perempuan. Tetapi semua ini kembali lagi pada kesepakatan di antara keluarga tani itu sendiri perihal pembagian kerja di dalam rumah tangganya. Sebab dalam temuan peneliti, juga terdapat petani laki-laki yang dalam hal ini menggantikan posisi istrinya ketika berhalangan hadir dalam kegiatan KWT-KWT tersebut. Bahkan dalam proses pembukaan lahan, pembibitan dan penanaman tanaman di Lumbung Mataraman juga menunjukkan adanya kerjasama (gotong royong) antara petani laki-laki dan petani perempuan, meskipun untuk pemeliharaan tanaman lebih lanjutnya diserahkan pada petani wanita melalui KWT tersebut.

Lebih lanjut, temuan peneliti juga menunjukkan bahwa alasan lain belum memprioritaskan partisipasi kelompok tani yang beranggotakan laki-laki atau bapak-bapak, hal ini dikarenakan lahan yang dikelola di dalam Lumbung Mataraman saat ini masih hanya seluas 2 Ha, sehingga peruntukan lahan kepada semua gabungan kelompok tani masih terbatas. Hal serupa dikemukakan juga oleh Didik Purnomo selaku Direktur Lumbung Mataraman dan sekaligus sebagai Ulu-Ulu Kalurahan Kedungpoh, yakni:

“Semuanya dilaksanakan secara bertahap. Jadi saat ini KWT dulu yang diprioritaskan, karena disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang digarap juga. Tapi masih ada seluas 8 Ha tanah kas desa yang belum terkelola di lumbung. Jika usaha yang sekarang ini berjalan lancar dan sukses, maka tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan berikutnya kita berikan ruang kepada kelompok tani bapak-bapak”.

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa untuk pengembangan Lumbung Mataraman lebih lanjut kedepannya tidak

menutup kemungkinan akan adanya ruang untuk partisipasi kelompok tani bapak-bapak. Sebab, masih terdapat 8 Ha lagi tanah kas Kalurahan Kedungpoh yang dapat dikelolah oleh Lumbung Mataraman kedepannya. Namun semua itu akan terwujud apabila usaha dan program-program pengelolaan serta pengembangan Lumbung Mataraman saat ini dapat berjalan lancar, maju dan sukses. Sehingga Lumbung Mataraman memiliki modal yang cukup untuk pengembangan usaha lebih lanjut kedepannya.

Namun menurut peneliti, meskipun hanya Kelompok Wanita Tani (KWT) yang benar-benar tercatat sebagai pengelola Lumbung Mataraman, tetapi kelompok tani dan unsur masyarakat lainnya juga dapat terlibat pada kegiatan-kegiatan lainnya seperti pelatihan dan percontohan pembuatan Pupuk Kompos dan Pupuk Organik Cair (POC). Dimana manfaat dari kegiatan ini juga tidak hanya dirasakan oleh anggota-anggota KWT, melainkan oleh semua masyarakat setempat. Berkaitan dengan hal itu, Julius Giri selaku Dukuh Gentungan juga mengungkapkan bahwa:

“Misalnya saja, saya tidak terlibat sebagai pengelola Lumbung Mataraman walaupun beberapa Perangkat Kalurahan lainnya terlibat aktif sebagai pengelolanya. Tapi semuanya baik-baik saja karena istri saya juga merupakan anggota KWT dari Padukuhan Gentungan. Jadi sesekali jika dia tidak bisa hadir kadang saya juga yang menggantikannya. Lalu saya dan masyarakat lainnya juga dibolehkan terlibat misalnya ketika ada pelatihan pembuatan Pupuk Kompos dan POC saat itu”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sekalipun gabungan kelompok tani dan masyarakat setempat lainnya bukan merupakan pengelola Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh, namun melalui partisipasinya pada kegiatan yang bersifat massal seperti saat pembukaan lahan maupun pelatihan, semuanya telah mencerminkan bahwa adanya

antusiasme dari masyarakat Kedungpoh pada umumnya dalam menyukseskan program Lumbung Mataraman tersebut. Menurut peneliti, nilai gotong royong dan semangat solidaritas yang demikian tentu akan menjadi modal yang sangat penting dalam pengembangan Lumbung Mataraman secara berkelanjutan kedepannya. Peneliti melihat bahwa antusiasme ini menunjukkan bahwa baik pemerintah Kalurahan Kedungpoh dan unsur masyarakat lainnya menaruh harapan yang besar terhadap Lumbung Mataraman tersebut, agar kedepannya dapat menciptakan terobosan baru, khususnya mengenai sistem pertanian terpadu dengan konsep pertanian semi modern, yang pada gilirannya dapat dicontohi oleh masyarakat setempat guna mewujudkan ketahanan pangan lokal di Kalurahan Kedungpoh itu sendiri.

Namun bukan berarti bahwa semua proses akan berjalan lancar dan sesuai rencana. Dalam perkembangannya saat ini, khususnya KWT-KWT sebagai pengelola inti di dalam Lumbung Mataraman tersebut, kini partisipasi aktifnya semakin meredup. Alhasil, temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini hanya pengelola dari perangkat Kalurahan dan beberapa KWT yang masih benar-benar intens terlibat dalam kegiatan hariannya. Kolib Nurhidin selaku Kaur Tata Laksana Kalurahan Kedungpoh dan sekaligus pengelola Lumbung Mataraman, menyampaikan bahwa:

“Awalnya semua KWT itu terlibat. Karena melihat semangat mereka di awal, pemerintah Kalurahan pun tidak tanggung-tanggung memberikan lahan 1 kavling untuk masing-masing kelompok KWT. Jadi lahan yang dikelola sekarang itu ada 2 hektar, dimana yang 1 hektarnya itu dibagikan kepada masing-masing KWT (10 KWT) sebanyak 1.000 m². Sementara lahan

untuk pengelola dari Kalurahan, juga menggunakan lahan yang sama dengan setiap KWT, yaitu seluas 1.000 m^2 ”. Tapi partisipasi KWT yang benar-benar serius mengelola lahan tersebut semakin berkurang sekarang”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap KWT dari 10 Padukuhan yang ada di Kalurahan Kedungpoh tersebut telah diberikan lahan masing-masing 1 kavling seluas 1.000 m^2 (meter persegi). Hal serupa juga berlaku kepada pengelola dari pemerintah Kalurahan, sehingga pembagian lahan kelola tersebut dapat dikatakan adil. Artinya, dengan luas lahan 2 Ha yang kelola oleh Lumbung Mataraman, maka sebanyak 11.000 m^2 atau setara 60% diantaranya telah terpakai sebagai lahan kelola bagi para pengelolanya. Sedangkan seluas 9.000 m^2 lahannya lainnya digunakan untuk pembibitan dan budidaya tanaman percontohan, lahan untuk tanaman milik Lumbung Mataraman itu sendiri, lahan untuk kandang sapi, kolam ikan, *green house*, parkiran, taman dan tugu Lumbung Mataraman, pendopo untuk pertemuan, kamar mandi dan toilet serta untuk prasarana lainnya.

Namun kembali lagi pada tingkat partisipasi KWT itu sendiri yang semakin meredup sekalipun telah mempunyai lahan kelolanya sendiri di dalam Lumbung Mataraman, dimana semuanya hanya terlibat aktif pada tahap pengembangan awalnya saja. Sayangnya, setelah setiap KWT melakukan panen beberapa komoditas di lahan kelolanya masing-masing, kemudian beberapa KWT tidak melakukan pembibitan dan budidaya ulang lagi dan pada akhirnya hanya tersisa tiga hingga lima KWT saja yang masih aktif dan terus melakukan pengelolaan dan pengembangan lebih

lanjut. Berkaitan dengan hal ini, kemudian disampaikan juga oleh Heni Putriani selaku ketua KWT Mekar bahwa:

“Saat ini yang benar-benar aktif itu tinggal pengelola yang dari perangkat Kalurahan dan KWT-KWT terdekat lumbung saja, seperti KWT Mekar dari Padukuhan Kedungpoh Kidul, KWT Lantip Makarti dari Padukuhan Kedungpoh Lor, dan KWT dari Padukuhan Kedungpoh Tengah. Sementara KWT-KWT lainnya setelah panen tahap pertama di bulan Mei 2024 lalu, itu sekarang jarang kelihatan lagi. Padahal seharusnya sekarang ini sudah masa penyiapan lahan dan pembibitan lagi untuk penanaman pada periode Juli-Agustus 2024 ini”.

Dalam temuan peneliti lebih lanjut, menunjukkan bahwa menurunnya partisipasi beberapa KWT lainnya juga karena faktor jarak yang lumayan jauh ke lokasi Lumbung Mataraman. Hal ini seperti disinggung dalam pernyataan di atas bahwa KWT yang benar-benar intens saat ini hanyalah KWT dari Padukuhan yang memang lebih dekat dengan Lumbung Mataraman tersebut. Dilain sisi, pasifnya partisipasi KWT secara organisasional juga ditandai dengan kurang solidnya anggota di dalam KWT itu sendiri. Apalagi sistem kerja yang digunakan yaitu menerapkan sistem piket, yang mana terdapat beberapa anggota kelompok KWT yang kurang tertib dalam menjalankan tugas piketnya, sehingga justru membebani anggota lainnya.

Sebagai contoh, jumlah anggota kelompok KWT dari Padukuhan Mojosari yang piket pada hari Senin misalnya berjumlah 5 orang, tetapi yang hadir hanya 2 atau 3 orang saja sehingga ini memberikan beban kerja kepada mereka yang hadir untuk mengerjakan semuanya. Padahal lahan KWT yang dikelola tersebut menjadi tanggungjawab semua anggota KWT di dalamnya dan hasilnya juga akan dinikmati sama-sama. Selain itu,

setiap anggota KWT yang piket tersebut tidak hanya melakukan perawatan, pengotrolan dan penyiraman pada tanaman di lahan kelompoknya masing-masing saja, melainkan secara kolektif dengan pengelola lainnya juga melakukan hal yang sama pada tanaman percontohan dan tanaman milik Lumbung Mataraman itu sendiri.

Oleh karenanya, melihat tingkat partisipasi KWT yang semakin surut tersebut, menurut peneliti hal ini perlu disikapi bersama oleh pemerintah Kalurahan setempat dengan pengurus atau pengelola Lumbung Mataraman untuk mengetahui alasan mendasar yang mengakibatkan kurang aktifnya KWT-KWT lainnya. Dalam hal ini, pihak kalurahan selaku penanggung jawab utama di Lumbung Mataraman perlu mendeteksi apakah minimnya partisipasi KWT ini karena faktor jarak bagi Padukuhan yang jauh dengan lokasi lumbung, atau karena kurangnya kesolidan diantara anggota di dalam KWT, atau karena memang mereka sudah selesai panen dan masih menunggu tahap penanaman berikutnya pada bulan Juli-Agustus 2024 mendatang, atau mungkin saja karena beberapa KWT tersebut kurang sepakat dengan konsep maupun sistem yang diterapkan di dalam Lumbung Mataraman itu sendiri seperti mengenai sistem bagi hasil atau masalah pemanfaatan lahan.

Sayangnya, dalam temuan lapangan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan setempat, Direktur dan pengelola Lumbung Mataraman hingga saat ini belum dapat memastikan secara jelas terkait hal-hal apa saja yang menjadi faktor penyebab menurunnya partisipasi beberapa KWT belakangan ini. Sebab menurut peneliti, jika hal ini tidak

segera diatasi bersama maka permasalahan tersebut akan semakin merambat dan menjadi berkepanjangan, yang nantinya justru dapat menghambat proses pengembangan Lumbung Mataraman itu sendiri. Artinya, peran pemerintah Kalurahan sebagai pengelola sekaligus pendamping pada konteks ini sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan signifikan dalam hal memfasilitasi, membina, memotivasi dan mengorganisasikan semua KWT yang ada dari 10 Padukuhan tersebut agar dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi alternatif yang tepat secara bersama.

B. Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Lokal

Keberadaan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh ini tidak bisa dipisahkan dari upaya-upaya pemerintah Kalurahan dan masyarakat setempat guna mewujudkan ketahanan pangan lokal. Hal ini dapat dilihat dari semulanya tanah kas Kalurahan tersebut tidak difungsikan, namun saat ini menjadi lahan kelola bagi Lumbung Mataraman, dengan harapan bahwa hasil pangan dari Lumbung Mataraman ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan ketersediaan pangan di Kalurahan Kedungpoh. Artinya, program atau usaha pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman yang dilakukan atas nama kepentingan bersama tersebut, maka harus pula memberi manfaat yang dapat dirasakan secara bersama oleh masyarakat Kedungpoh pada umumnya.

Berkaitan dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan lokal melalui Lumbung Mataraman, kemudian diterangkan oleh Ruslan Mudzakir selaku Carik Kalurahan Kedungpoh bahwa:

“Konsep Lumbung Mataraman dari dulu hingga sekarang itu masih sama, yaitu bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Sehingga dengan dibangunnya Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh ini, tentu sudah menjadi harapan kami semua baik pemerintah Kalurahan dan masyarakat Kedungpoh agar kedepannya lumbung tersebut bisa memberi dampak yang besar bagi ketahanan pangan lokal, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk ketahanan pangan daerah atau nasional. Tapi fokus saat ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal dulu”.

Pernyataan di atas telah mengafirmasi kembali bahwa konsep dan tujuan dari Lumbung Mataraman itu sendiri tidak lain yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat pula mewujudkan ketahanan pangan di tingkat lokal pedesaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan di atas yang menunjukkan bahwa fokus utama dalam pengembangan Lumbung Mataraman Kedungpoh saat ini yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal terlebih dahulu. Namun jika produksi pangan di lumbung tersebut terus berkembang maju, juga tidak menutup kemungkinan bahwa Lumbung Mataraman Kedungpoh kedepannya dapat memberi kontribusi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa serangkaian upaya dalam proses pelembagaan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh itu sendiri secara bertahap dan berkesinambungan memang mempunyai tujuan yang, pada gilirannya mengarah pada perwujudan ketahanan pangan, khususnya ketahanan pangan lokal bagi Kalurahan Kedungpoh itu sendiri. Namun faktanya saat ini, tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal melalui Lumbung Mataraman tersebut bisa dikatakan masih jauh dari harapan. Hal ini bukan berarti bahwa berbagai upaya yang dilakukan di dalam Lumbung Mataraman tersebut berujung gagal, melainkan

karena memang lumbung tersebut saat ini masih pada tahap pembangunan dan pengembangan awal. Hal serupa juga dipaparkan oleh Didik Purnomo selaku Direktur Lumbung Mataraman dan Kasi Ulu-Ulu Kalurahan Kedungpoh, yakni:

“Kalau bicara dampaknya saat ini dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masih belum, karena Lumbung Mataraman sendiri masih terbilang baru di Kedungpoh. Tapi sesuai dengan tujuan dibangunnya Lumbung Mataraman, maka tentu kita akan mengarahkan lumbung ini sebagai strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kalurahan Kedungpoh. Saat ini, pengelola lumbung sedang menyiapkan dan melaksanakan tahapannya agar kedepannya hasil produksi pangan di Lumbung Mataraman ini mengarah kesana (mewujudkan ketahanan pangan lokal)”.

Dari pemaparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Lumbung Mataraman saat ini belum memberikan dampak yang signifikan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan lokal, karena mengingat keberadaan Lumbung Mataraman itu sendiri yang masih baru dan masih pada tahap pembangunan awal. Namun dari berbagai kegiatan dan program yang sedang dijalankan di dalam Lumbung Mataraman saat ini mempunyai korelasi yang kuat terhadap proses perwujudan ketahanan pangan lokal di Kalurahan Kedungpoh. Sebab, sistem pertanian terpadu yang saat ini dikembangkan di dalam Lumbung Mataraman tersebut mempunyai orientasi terhadap upaya pemenuhan ketahanan pangan.

Menurut peneliti, meskipun keberadaan Lumbung Mataraman masih terbilang baru, karena baru saja diresmikan pada tanggal 4 Desember 2023 lalu. Namun per hari ini (25 Juni 2024) dengan usianya yang masih muda (sekitar 6 bulanan) tersebut dan masih dalam proses membangun, tetapi Lumbung Mataraman juga sudah mampu memproduksi komoditas pangan.

Adapun komoditas pangan yang sudah dikembangkan di dalam Lumbung Mataraman, yaitu seperti aneka sayuran (bayam, kangkung, sawi, buncis, kacang panjang, pare, kol, dll), cabe, tomat, bawang merah, singkong, kacang tanah, timun, anggur, lemon, strawberry, markisa dan lain sebagainya. Menurut peneliti, sekalipun Lumbung Mataraman dalam kondisinya saat ini belum mampu memberikan dampak yang luas terhadap ketahanan pangan lokal, tetapi capaian-capaian yang sudah diperoleh sekarang ini perlu juga diapresiasi, yang harapannya capaian tersebut akan terus meningkat guna mewujudkan ketahanan pangan lokal kedepannya.

Lebih lanjut, hasil produksi pangan di Lumbung Mataraman saat ini masih relatif kecil karena hal ini sesuai dengan luasan lahan yang dikelola juga masih terbatas. Namun demikian, hasil pangan di Lumbung Mataraman saat ini setidaknya sudah mulai memberi dampak pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga tani setempat. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemenuhan kebutuhan pangan—terutama kebutuhan sayur-mayur—bagi keluarga tani setempat melalui proses bagi hasil yang diperoleh oleh para anggota KWT yang terlibat dalam pengelolaan Lumbung Mataraman tersebut. Disamping itu, masyarakat lainnya juga sudah mencicipi hasil dari Lumbung Mataraman karena datang membeli langsung di lokasi dengan harga komoditas pangan yang relatif terjangkau dan masih segar-segar. Hal ini sesuai dengan informasi yang dihimpun peneliti melalui wawancara dengan Suyanti selaku ketua KWT Lancip Makarti, yang menuturkan bahwa:

“Untuk hasilnya saat ini memang masih jauh jika dikaitkan dengan ketahanan pangan untuk semua masyarakat Kedungpoh. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan sayur-mayur bagi keluarga para anggota KWT yang terlibat, sejauh ini lumayan membantu.

Misalnya saya, semenjak terlibat dalam pengelolaan lumbung ini, sekarang sudah jarang membeli sayur di pasar kecuali belum masa panen di lumbung. Bahkan sekarang ini sudah banyak juga masyarakat Kedungpoh yang datang membeli sayuran di lumbung ketimbang membeli di pasar, karena kami memberi harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat Kedungpoh”.

Oleh karenanya, menurut peneliti, keberadaan Lumbung Mataraman saat ini secara bertahap sudah mampu memberi manfaat yang tidak hanya bagi pengelolanya saja, tetapi juga kepada masyarakat Kedungpoh pada umumnya. Dalam hal ini, terlepas bahwa manfaatnya belum pada taraf memenuhi, tetapi setidaknya sudah membantu. Artinya, upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal di Kalurahan Kedungpoh ini tidak serta merta menjadi kewajiban Lumbung Mataraman, melainkan menjadi kewajiban bagi semua penduduk kalurahan setempat. Dalam hal ini, penduduk setempat juga perlu memproduksi dan mengembangkan tanaman pangan di lahannya masing-masing, mulai dari pemanfaatan pekarangan rumah hingga pada lahan pertanian lainnya seperti sawah atau kebun guna memenuhi kebutuhan pangan keluarganya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan ketahanan pangan lokal di Kalurahan Kedungpoh, temuan peneliti lebih lanjut menunjukkan bahwa sebelum adanya Lumbung Mataraman pun pemerintah Kalurahan Kedungpoh sudah mendorong masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai petani untuk meningkatkan produksi pertanian di lahan garapannya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan adanya pos anggaran dari Dana Kalurahan untuk program ketahanan pangan setiap tahunnya. Sehingga pada konteks ini, keberadaan Lumbung Mataraman bukanlah satu-satunya strategi, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari serangkaian upaya dan strategi

yang dilakukan baik oleh pemerintah Kalurahan maupun masyarakat setempat dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal di Kalurahan Kedungpoh. Hal ini sejalan dengan informasi yang dihimpun peneliti dari Kolib Nurhidin selaku Kaur Tata Laksana, yang menyatakan bahwa:

“Lumbung Mataraman ini hanya sebagai tempat percontohan dan ruang belajar bagi masyarakat dalam mengembangkan sistem pertanian terpadu dengan konsep pertanian semi modern. Harapan kami, pola yang diterapkan di lumbung ini bisa dikembangkan lagi oleh masyarakat di lahannya masing-masing agar sama-sama dapat mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama”.

Dari pernyataan di atas, menekankan bahwa Lumbung Mataraman itu sendiri merupakan tempat percontohan sistem pertanian terpadu dengan konsep pertanian semi modern, yang harapannya sistem dan konsep pertanian terpadu yang demikian dapat dikembangkan oleh masyarakat setempat di lahan garapannya masing-masing, sehingga setiap masyarakat juga dapat memberi kontribusi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan lokal di Kalurahan Kedungpoh. Menurut peneliti, hal ini berarti bahwa pemerintah Kalurahan dan masyarakat setempat tidak bisa hanya bergantung pada peran dan dampak dari Lumbung Mataraman semata dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan lokal, sehingga memerlukan upaya bersama melalui pemanfaatan sumber daya lokal lainnya.

Perlu peneliti ingatkan kembali, bahwa ketahanan pangan sendiri mengandung makna yang sangat kompleks, karena akan berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan tanaman pangan yang dikembangkan di Lumbung Mataraman saat ini hanya berupa tanaman hortikultura berjenis sayur-mayur dan beberapa jenis buah-buahan. Ditambah lagi dengan hasil produksi pangan yang masih minim karena lahan

yang masih terbatas, maka menurut peneliti semua ini belum bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan pangan masyarakat setempat. Dengan demikian, peran dari Lumbung Mataraman itu sendiri hanya bersifat membantu masyarakat setempat dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangannya, khususnya kebutuhan yang berupa sayur-mayur, cabe, bawang merah, tomat, timun dan beberapa aneka buah.

Namun karena kuantitas produksi komoditas pangan tersebut juga masih terbatas, maka saat ini Lumbung Mataraman pun belum mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan sayur-mayur dan buah yang sesuai dengan tingkat permintaan masyarakat setempat. Akan tetapi, jika usaha sistem pertanian terpadu di Lumbung Mataraman ini terus berkembang kedepannya, dari yang saat ini hanya mengelola 2 Ha dan kedepannya sudah mampu untuk mengelola semua tanah kas Kalurahan yang seluas 10 Ha tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Lumbung Mataraman tidak hanya mampu memenuhi tingkat permintaan sayur-mayur bagi masyarakat setempat saja, tetapi juga untuk permintaan pasar yang lebih luas. Oleh karenanya, kolaborasi pemerintah Kalurahan, masyarakat setempat dan stakeholder lainnya menjadi sangat penting dalam proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman lebih lanjut kedepannya. Disamping itu, pemerintah Kalurahan dan masyarakat setempat juga perlu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam lainnya guna mewujudkan ketahanan pangan lokal di Kalurahan Kedungpoh.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Sudah tentu bahwa segala sesuatu yang dilakukan perlu disesuaikan dengan faktor pendukung dan penghambat yang mungkin saja terjadi. Berkaitan dengan faktor pendukung, maka hal ini merujuk pada bagaimana upaya pemerintah Kalurahan Kedungpoh beserta pengelola Lumbung Mataraman dalam memanfaatkan peluang atau potensi yang ada guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman tersebut berpeluang sukses dan maju kedepannya, karena hal ini didukung oleh potensi sumber daya yang mumpuni, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan lahan yang masih luas untuk pengembangan Lumbung Mataraman lebih lanjut kedepannya. Untuk itu, pemanfaatan dan optimalisasi kedua potensi tersebut memungkinkan Lumbung Mataraman mencapai tujuannya, diantaranya yaitu berpeluang untuk menjadi wisata edukasi dan mampu mewujudkan ketahanan pangan lokal. Hal serupa juga diterangkan oleh Didik Purnomo selaku Direktur Lumbung Mataraman dan Ulu-Ulu Kalurahan Kedungpoh, yakni:

“Faktor pendukung yang paling menentukan itu karena adanya SDM yang mumpuni, sehingga mampu mengelola lumbung ini dengan baik dan bertanggung jawab. Selain itu, juga karena adanya lahan yang tersedia untuk pengembangan lumbung lebih lanjut masih luas yaitu 8 Ha”.

Menurut peneliti, faktor pendukung melalui SDM yang mumpuni tersebut dapat diartikan bahwa: 1) tersedianya kuantitas tenaga pengelola

Lumbung Mataraman yang banyak karena dalam pengelolaannya melibatkan kelompok pengelola dari pemerintah Kalurahan itu sendiri dan kelompok pengelola dari 10 KWT; 2) sistem kerja kelompok dan gotong royong juga memungkinkan bahwa pekerjaan yang dilakukan menjadi ringan dan mudah, sehingga hal ini mendorong tingkat produktivitas dalam pengelolaan Lumbung Mataraman; dan 3) pengelola mempunyai kemampuan dalam memanajemen dan mengembangkan usaha Lumbung Mataraman dengan baik, dimana hal ini dapat dilihat dalam proses pelembagaan Lumbung Mataraman itu sendiri yang dilakukan secara efektif dan sistematis seperti pengelolaan keuangan yang efisien, penerapan sistem piket, bagi hasil, pengembangan lumbung secara bertahap, penerapan sistem pertanian terpadu, produksi pupuk organik dan lain sebagainya. Dengan demikian, pemanfaatan dan optimalisasi potensi SDM tersebut secara bertahap akan mampu mengantarkan Lumbung Mataraman menjadi wisata edukasi dan mampu mewujudkan ketahanan pangan lokal.

Sedangkan mengenai faktor pendukung karena masih tersedianya lahan yang dapat dikelola dalam pengembangan Lumbung Mataraman lebih lanjut kedepannya, hal ini kemudian dipaparkan oleh Iwan Suswanto selaku Dukuh Nglorok dan sekaligus pengelola Lumbung Mataraman bahwa:

“Pemerintah Kalurahan sudah menetapkan bahwa tanah kas Kalurahan yang digunakan oleh Lumbung Mataraman secara keseluruhan ada 10 Ha. Sementara yang sudah terkelola saat ini hanya 2 Ha, sehingga masih tersedia 8 Ha lagi untuk pengelolaan lumbung pada tahap-tahap berikutnya. Maksudnya, kesediaan lahan seluas 8 Ha ini menjadi salah satu

aset yang mendukung untuk pengembangan lumbung kedepannya”.

Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa lahan untuk pengelolaan Lumbung Mataraman secara umum mencapai 10 Ha, sementara lahan yang sudah dikelola saat ini baru 2 Ha sehingga masih tersedia lahan seluas 8 Ha lagi sebagai cadangan bagi Lumbung Mataraman guna pengembangan lebih lanjut kedepannya. Menurut peneliti, ketersediaan lahan kelola yang masih ada seluas 8 Ha tersebut menjadi faktor yang sangat mendukung karena usaha-usaha yang dikembangkan di Lumbung Mataraman itu sendiri dalam banyak hal lebih difokuskan pada sektor pertanian. Sebagaimana pula kita ketahui bersama bahwa untuk mengembangkan usaha di sektor pertanian, salah satu kebutuhan mendasarnya adalah mengenai ketersediaan lahan, sehingga hal ini tidak menjadi hambatan lagi bagi Lumbung Mataraman karena masih memiliki lahan cadangan seluas 8 ha tersebut.

Dalam temuan peneliti lebih lanjut, menunjukkan bahwa sisa lahan seluas 8 Ha yang belum terkelola saat ini juga sudah masuk dalam rencana pembangunan Lumbung Mataraman itu sendiri. Namun karena proses pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman dilakukan secara bertahap, pada akhirnya untuk tahun anggaran 2024 saat ini masih difokuskan pada pengelolaan lahan seluas 2 Ha. Selain itu, menurut penelusuran peneliti, diketahui bahwa pengelolaan pada lahan seluas 2 Ha tersebut akan menjadi penentu dalam pengembangan Lumbung Mataraman lebih lanjut.

Artinya, jika usaha-usaha yang dikembangkan saat ini berhasil dan sukses serta dapat menambah pemasukan bagi Lumbung Mataraman secara signifikan, maka hal ini akan memungkinkan terjadinya pengembangan usaha lebih lanjut pada sebagian lahan yang masih belum tergarap. Oleh karenanya, kemampuan SDM dari pengelola Lumbung Mataraman pada konteks ini sangat penting agar senantiasa mengarahkan Lumbung Mataraman dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, maka dibutuhkan adanya sinergitas peran antara pemerintah Kalurahan setempat dengan semua pengelola Lumbung Mataraman Kedungpoh agar mampu mengatasi setiap masalah yang terjadi secara bersama, perlu adanya komitmen dan keseriusan dengan meningkatkan partisipasi dari semua stakeholder yang terlibat, serta perlunya melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang mendukung proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman kedepannya.

2. Faktor Penghambat

Proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman tampaknya tidak berjalan mulus dan lancar seperti yang diharapkan. Fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman dalam mencapai tujuannya. Adapun faktor penghambat tersebut yaitu karena peran pemerintah Kalurahan dalam mengorganisasikan (mensosialisasi, memotivasi, mengorganisir dan mendampingi) masyarakat agar terlibat aktif dalam pengembangan Lumbung Mataraman belum maksimal, masih minimnya partisipasi

anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dari setiap Padukuhan, SDM Pengelola Lumbung Mataraman yang masih terbatas, Kekurangan air di musim kemarau dan masalah hama yang masih sulit diatasi.

Perihal minimnya partisipasi anggota KWT dari setiap Padukuhan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Lumbung Mataraman, hal ini dipaparkan oleh Heni Putriani selaku ketua KWT Mekar bahwa:

“Belakangan ini partisipasi anggota khususnya di KWT Mekar itu sendiri semakin menurun, karena hampir semua tanaman sayuran yang ditanami sudah melakukan panen tahap pertama. Sehingga saat ini memang kondisinya lagi tidak ada pekerjaan kelompok yang mengharuskan anggota datang ke lokasi lumbung. Namun karena saat ini juga sedang dalam persiapan untuk proses penanaman pada tahap kedua, harapannya anggota-anggota KWT Mekar mulai aktif lagi”.

Sejalan dengan pernyataan di atas, hal serupa juga dituturkan oleh Suyanti selaku ketua KWT Lantip Makarti bahwa:

“Minimnya partisipasi anggota KWT itu juga dipengaruhi karena kekosongan kegiatan di dalam kelompok. Karena setelah masa panen tahap pertama pada bulan Mei 2024 lalu, KWT Lantip Makarti sendiri saat ini belum melakukan program penanaman kembali lagi. Rencananya akan mulai melakukan penanam tahap kedua di bulan Juli 2024 ini dan harapannya anggota-anggota KWT mulai aktif lagi. Begitu juga kondisinya dengan KWT yang lain dan dengan harapan yang sama”.

Dari pemaparan kedua narasumber di atas, menunjukkan bahwa minimnya partisipasi anggota KWT belakangan ini salah satunya dipengaruhi karena kekosongan pekerjaan di dalam kelompok KWT itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan lahan garapan KWT sudah tidak ada tanaman yang perlu dirawat secara intens lagi setelah melakukan proses pemanenan pada bulan Mei 2024 lalu. Namun semuanya berharap agar

anggota-anggota KWT tersebut bisa aktif kembali lagi seperti semulanya pada proses penanaman tahap berikutnya agar.

Menurut peneliti, kekosongan pekerjaan di dalam KWT yang mengakibatkan para anggotanya menjadi kurang aktif tersebut perlu dibenahi oleh pengurus kelompok. Sebab hal tersebut telah menciptakan ruang “jeda” yang dapat mempengaruhi vakumnya aktivitas KWT itu sendiri. Sehingga jika tidak segera diatasi, maka hal ini dapat mempengaruhi tingkat produktivitas Lumbung Mataraman semakin menurun kedepannya. Oleh karenanya, baik pengurus KWT, Direktur Lumbung Mataraman dan pemerintah Kalurahan setempat perlu memotivasi para anggota KWT agar dapat terlibat aktif secara berkelanjutan. Selain itu, masa penanaman juga perlu disesuaikan agar tidak mengakibatkan jeda waktu yang lama dengan mengatur jadwal tanam dan panen secara berkesinambungan. Dengan demikian, maka proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman dapat dilanjutkan dengan memperhatikan keterlibatan secara aktif dan masif dari seluruh anggota di semua KWT yang ada.

Untuk itu, diperlukan SDM yang mumpuni bagi pengelola agar dapat mengatasi berbagai kendala atau hambatan yang mempengaruhi gagalnya proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman tersebut. Sebab berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, menunjukkan bahwa sekalipun SDM secara kuantitas cukup mumpuni, tetapi secara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pengelola Lumbung Mataraman tersebut masih terbatas. Karena metode

pembelajaran yang selama ini dilakukan masih sebatas melalui bimbingan penyuluhan pendamping, tanpa adanya kelas khusus seperti dalam bentuk pelatihan ataupun workshop. Artinya, pengetahuan yang diperoleh para pengelola Lumbung Mataraman masih belum maksimal, Sehingga hal ini perlu adanya dorongan agar semua pengelola Lumbung Mataraman Kedungpoh terus belajar mengembangkan konsep sistem pertanian terpadu tersebut secara lebih intens dan masif lagi.

Permasalahan lain yang juga dapat menghambat proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman yaitu masalah ketersediaan air yang kurang pada musim kemarau dan masalah hama. Berkaitan dengan hal ini, Kolib Nurhidin selaku Kaur Tata Laksana dan sekaligus pengelola Lumbung Mataraman juga menyampaikan bahwa:

“Yang masih menjadi tantangan saat ini dan kedepannya dalam pengembangan lumbung adalah masalah ketersediaan air. Karena pada musim kemarau, Kalurahan Kedungpoh pada umumnya biasa mengalami kekurangan air. Ini juga terjadi di Lumbung Mataraman dimana ketersediaan airnya masih sangat terbatas, sehingga kami sangat khawatir jika pada saat musim kemarau justru persediaan air untuk perawatan tanaman tidak cukup di lumbung. Begitu juga dengan hama yang masih sulit diatasi karena lumbung sendiri belum memiliki pengelola yang benar-benar ahli di bidang pertanian, karena semua pengelola di lumbung ini juga masih dalam tahap belajar”.

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa ketersediaan air bersih yang masih terbatas di dalam Lumbung Mataraman Kedungpoh sangat mempengaruhi produktivitas kedepannya. Hal ini dilihat dari kondisi ketersediaan air di Kalurahan Kedungpoh pada umumnya yang sering mengalami kekurangan saat musim kemarau. Disamping itu, hama juga menjadi ancaman tersendiri bagi para petani di Kalurahan Kedungpoh,

karena masyarakat dan termasuk pengelola Lumbung Mataraman itu sendiri belum memiliki keahlian yang mumpuni dalam hal mengatasi berbagai hama yang merusak tanaman mereka.

Menurut peneliti, permasalahan ketersediaan air yang masih minim tersebut perlu diatasi oleh pemerintah Kalurahan dan pengelola Lumbung Mataraman. Sebab, baik tanaman, ternak sapi dan ikan yang dibudidayakan melalui konsep pertanian terpadu di dalam Lumbung Mataraman tersebut semuanya membutuhkan air. Karenanya, ketersediaan air pada konteks ini menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi keberhasilan Lumbung Mataraman kedepannya, tetapi jika airnya kurang maka ini akan sangat menghambat kelancaran pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman kedepannya. Disamping itu, menurut peneliti, masalah hama juga perlu diatasi, melalui peningkatan pengetahuan masyarakat dan khususnya pengelola Lumbung Mataraman agar mengetahui teknik-teknik pengendalian hama pada tanaman. Sebab jika masalah hama ini tidak bisa diatasi, maka hama-hama tersebut dapat merusak tanaman masyarakat yang kemudian mengakibatkan terjadinya gagal panen atau hasil pangan menjadi tidak maksimal. Dimana ini semua dapat menghambat Lumbung Mataraman dalam mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan ketahanan pangan lokal, kesejahteraan masyarakat dan wisata edukasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul “Pelembagaan Lumbung Mataraman Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan” yang dilakukan di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini ditinjau berdasarkan peran pemerintah Kalurahan dan partisipasi kelompok tani. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu terkait dengan proses pelembagaan Lumbung Mataraman Kedungpoh, upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal, faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan dan pengembangan Lumbung Mataraman. Penjelasan mengenai fokus penelitian tersebut akan peneliti uraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pertama, Pelembagaan Lumbung Mataraman. Dalam proses pelembagaan Lumbung Mataraman di Kalurahan Kedungpoh, hal ini dilihat dari peran pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Lumbung Mataraman Kedungpoh, dimana pada konteks ini pemerintah Kalurahan setempat berperan sebagai pengelola, pendampingan dan memfasilitasi jalannya program Lumbung Mataraman itu sendiri. Selain itu, pemerintah Kalurahan setempat juga berupaya untuk melakukan pemberdayaan dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat setempat khususnya kelompok tani, yang dalam hal ini yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) yang juga dilibatkan sebagai pengelola Lumbung Mataraman tersebut. Pada konteks ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan, pendampingan,

memberdayakan KWT dan memfasilitasi jalannya Lumbung Mataraman sudah terlaksana dengan baik, tetapi perlu juga dikembangkan secara berkelanjutan. Namun dalam hal memotivasi partisipasi aktif dari setiap KWT masih kurang dilakukan, sehingga dalam perkembangannya saat ini masih terdapat beberapa KWT yang belum sepenuhnya intens dalam mengelola lahan di Lumbung mataraman tersebut.

Kemudian, pengelolaan Lumbung Mataraman Kedungpoh menerapkan beberapa sistem yang meliputi: sistem pertanian terpadu yang menghubungkan sektor pertanian, peternakan dan perikanan; sistem kerja kolaboratif; sistem produksi, distribusi dan bagi hasil; sistem permodalan dan pengelolaan keuangan di Lumbung Mataraman. Lebih lanjut, juga program pengembangan Lumbung Mataraman yang dilakukan pada tahun anggaran 2024 ini antara lain meliputi: 1) budidaya tanaman hortikultura; 2) produksi pupuk organik yang bersumber dari kotoran ternak sapi untuk pembuatan pupuk kompos dan pupuk organik cair (POC); 3) pembibitan dan budidaya ikan nila dan wader pari; dan 4) menjadikan Lumbung Mataraman sebagai wisata edukasi. Selain itu, Partisipasi kelompok tani juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pelembagaan Lumbung Mataraman. Dimana pada konteks ini, kelompok tani, terutama Kelompok Wanita Tani (KWT) juga merupakan pengelola Lumbung Mataraman. Dalam dinamikanya, partisipasi anggota KWT pada awalnya masih, namun belakangan ini menjadi redup kembali. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kalurahan dalam memotivasi para anggota di setiap KWT masih belum maksimal.

Kedua, Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Lokal. Upaya ini sudah dilakukan melalui pengembangan sistem pertanian terpadu di dalam Lumbung Mataraman. Namun untuk saat ini hasil yang diperolehnya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan—khususnya sayur-mayur dan buah-buahan—bagi seluruh masyarakat Kedungpoh. Hal ini karena masih minimnya lahan yang digarap, yaitu hanya 2 Ha.

Ketiga, Faktor Pendukung dan Penghambat. Faktor pendukung dalam pengembangan Lumbung Mataraman yaitu perihal ketersediaan Sumber daya Manusia (SDM) yang mumpuni secara kuantitas dan proses pengelolaannya yang dilakukan secara swadaya masyarakat. Disamping itu, Lumbung mataraman juga di *support* oleh ketersediaan tanah yang masih cukup luas untuk pengembangan lebih lanjut kedepannya. Sebab pemerintah Kalurahan Kedungpoh telah menyediakan tanah kas Kalurahan seluas 10 Ha untuk pengelolaan dan pengembangan Lumbung mataraman itu sendiri. Namun terdapat juga beberapa faktor penghambatnya, yaitu perihal minimnya ketersediaan air pada musim kemarau. Selain itu, pengelola Lumbung Mataraman juga belum sepenuhnya memahami teknik pengendalian hama secara maksimal karena masih kurangnya pengetahuan dan keahlian pertanian masyarakat. Hal ini terjadi karena masih minimnya kegiatan pelatihan, workshop dan penyuluhan terhadap kelompok tani di Kalurahan Kedungpoh.

B. Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Proses pelembagaan Lumbung Mataraman perlu dioptimalkan lagi melalui signifikansi peran pemerintah dalam mengawal dan memotivasi semua

kelompok pengelola Lumbung Mataraman agar berpartisipasi aktif dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala, mengembangkan pola manajemen kelembagaan yang lebih efektif dan efisien. Program pengembangan Lumbung Mataraman sudah efektif, meningkatkan pendampingan pemerintah Kalurahan terhadap semua pengelola Lumbung Mataraman guna memastikan bahwa program-program tersebut berorientasi pada pencapaian tujuan Lumbung mataraman itu sendiri.

2. Semua pengelola Lumbung Mataraman baik itu yang dari Pemerintah Kalurahan maupun KWT perlu meningkatkan keterampilan dan keahliannya dalam pengembangan sistem pertanian terpadu melalui pelatihan, *workshop* dan penyuluhan dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Sehingga kedepannya Lumbung Mataraman mampu memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan lokal melalui peningkatan produksi pangan di dalamnya, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga tani, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kedungpoh pada umumnya.
3. Pemerintah Kalurahan, Pengelola Lumbung Mataraman dan masyarakat setempat terutama yang berprofesi sebagai petani perlu membangun sinergitas dalam mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada guna pengembangan Lumbung Mataraman kedepannya, serta secara kolektif mencari alternatif dan solusi dalam mengatasi hambatan maupun kendala yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Aditiawati, Pingkan., *et al.* (2016). “Pengembangan Potensi Lokal Di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional”. *Jurnal Sosio Teknologi*, Vol 1 (1).
- Ali, Khadir dan Agung Saputra. (2020). “Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar”. *Jurnal Dharmawangsa*, Vol 14 (4).
- Arikunto, Suharsimi. (2000). “*Manajemen Penelitian*”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziza, Tri Noor. (2019). “Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan”. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol 3 (1).
- Bachtiar, Harsya W., *et al.* (1985). “*Budaya dan Manusia Indonesia*”. Yogyakarta: YP2LPM Hanindita.
- Creswell, John W. (2016). “*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, Sutoro. (2008). “*Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*”. Yogyakarta: Institute for Research Empowerment.
- Gorensa Egot, Emilia. (2021). “Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Di Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten”. *Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”* Yogyakarta.
- Irawati, Riya., *et al.* (2023). “Strategi Penguatan Peran Kelembagaan Desa Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Di Desa Kendalbulur Kabupaten Tulungagung”. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, Vol 7 (2).
- Kristiawan. (2021). “*Ketahanan Pangan*”. Surabaya: Sucofindo Media Pustaka.
- Laily, Elida I. Nur. (2015). “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol 3 (3).
- Mikkelsen, Britha. (2011). “*Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan*”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2021) “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2002). “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mulyono, Agus. (2008). "Studi Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Muntuk Kabupaten Bantul". *Thesis program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Nasution, Z. (2009). "Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi: Suatu Tinjauan Sosiologis". Malang: UMM Press.
- Prabowo, Rossi. (2010). "Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia". *MEDIAGRO: Jurnal Ilmu Pertanian*, Vol 6 (2).
- Ratnasari, Siwi Dyah., *et al.* (2022). "Peran Pelembagaan Dalam Program One Village One Product Melalui Empowerment Masyarakat". *Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU)*, Vol 7 (2).
- Saraswati, Yudhistira., & Pratiwi, Rian Aditya. (2024). "Optimalisasi Penataan Lumbung Mataraman Dalam Mendukung Kawasan Wisata Edukasi Terpadu Padukuhan Ngalian, Desa Widodomartani". *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 10 (1).
- Sari, Intan Purnama., & Zuber, Ahmad. (2020). "Kearifan Lokal Dalam Membangun Ketahanan Pangan Nasional". *Journal of Development and Social Change*, Vol 3 (2).
- Soekanto, Soerjono., & Sulistyowati, Budi. (2017). "Sosiologi: Suatu Pengantar". Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Sumanto, A. Raihan., & Hamidah, Siti. (2023). "Tipe Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani Dalam Pengelolaan Lumbung Mataraman Di Padukuhan Jamblangan Sleman". *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, Vol 24 (2).
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). "Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia". Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Surasih, Maria Eni. 2006. "Pemerintah Desa dan Implementasinya". Jakarta: Erlangga.
- Sutopo, Ariesto Hadi., & Arief, Adrianus. (2016). "Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nvivo". Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ulfatin, Nurul. 2015. "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya". Malang: Media Nusa Creatif.

Peraturan Perundang Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Internet dan Artikel

Hendro. (2023, 06 Desember). “*Sri Sultan Hamengku Buwono X Mendukung Pengembangan Lumbung Mataram di Gunungkidul*”. Diakses pada tanggal 21 Februari 2024, dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5472334/sri-sultan-hamengku-buwono-x-dukung-pengembangan-lumbung-mataram-di-gunungkidul>.

<https://www.britannica.com/topic/institutionalization#ref338426>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2024.

Humas DIY. (2023, 04 Desember). “*Kalurahan Wajib Siap Sebelum Jalani Program Lumbung Mataraman*”. Diakses pada tanggal 21 Februari 2024, dari <https://jogjaprov.go.id/berita/kalurahan-wajib-siap-sebelum-jalani-program-lumbung-mataraman>.

Kalurahan Kedungpoh. (2023, 06 Desember). “*Panen Cabai Rawit, Sri Sultan Resmikan Lumbung Mataraman Kedungpoh*”. Diakses pada tanggal 21 Februari 2024, dari <https://desakedungpoh.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1970-Panen-cabe-rawit--Sri-Sultan-Resmikan-Lumbung-Mataraman-Kedungpoh>.

Natalia. (2022, 16 Maret). “*Pengertian Lembaga: Pengertian dan Contoh Lembaga di Indonesia*”. Diakses pada tanggal 20 Juli 2024, dari <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-lembaga/>.

LAMPIRAN
Pedoman Wawancara

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan/Jabatan :

Pertanyaan:

1. Pelembagaan Program Lumbung Mataraman

a. Peran Pemerintah Kalurahan/Desa

- Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan Lumbung Mataraman? Sebutkan!
- Apa tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan Lumbung Mataraman?

b. Sistem Pengelolaan Lumbung Mataraman

- Bagaimana sistem pengelolaan Lumbung Mataraman? Dirincikan mulai dari siapa pengelolanya, sistem permodalannya, Sistem produksi dan distribusinya, sistem pembagian hasilnya, dll.

c. Program Pengembangan Lumbung Mataraman

- Apa saja program-program dalam Lumbung Mataraman saat ini? Sebutkan!
- Apa saja yang dibudidayakan di dalam Lumbung Mataraman?

d. Partisipasi Kelompok Tani

- Bagaimana antusiasme dan tingkat partisipasi kelompok tani dalam pengelolaan Lumbung Mataraman?

2. Upaya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Lokal

- Bagaimana mewujudkan ketahanan pangan lokal melalui pengembangan Lumbung Mataraman?
- Bagaimana Dampak Lumbung Mataraman dalam memenuhi ketersediaan pangan lokal saat ini?

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

- Apa saja faktor pendukung yang dapat dikembangkan melalui pengembangan Lumbung Mataraman kedepannya? Sebutkan!
- Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam proses pengembangan Lumbung Mataraman saat ini? Sebutkan!
- Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut?

Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 015/PEM/J/TV/2024
Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

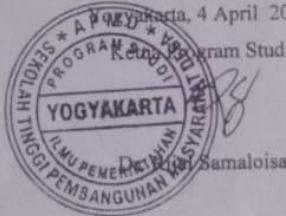
Kepada :
Minardi, S.I.P., M.Sc
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

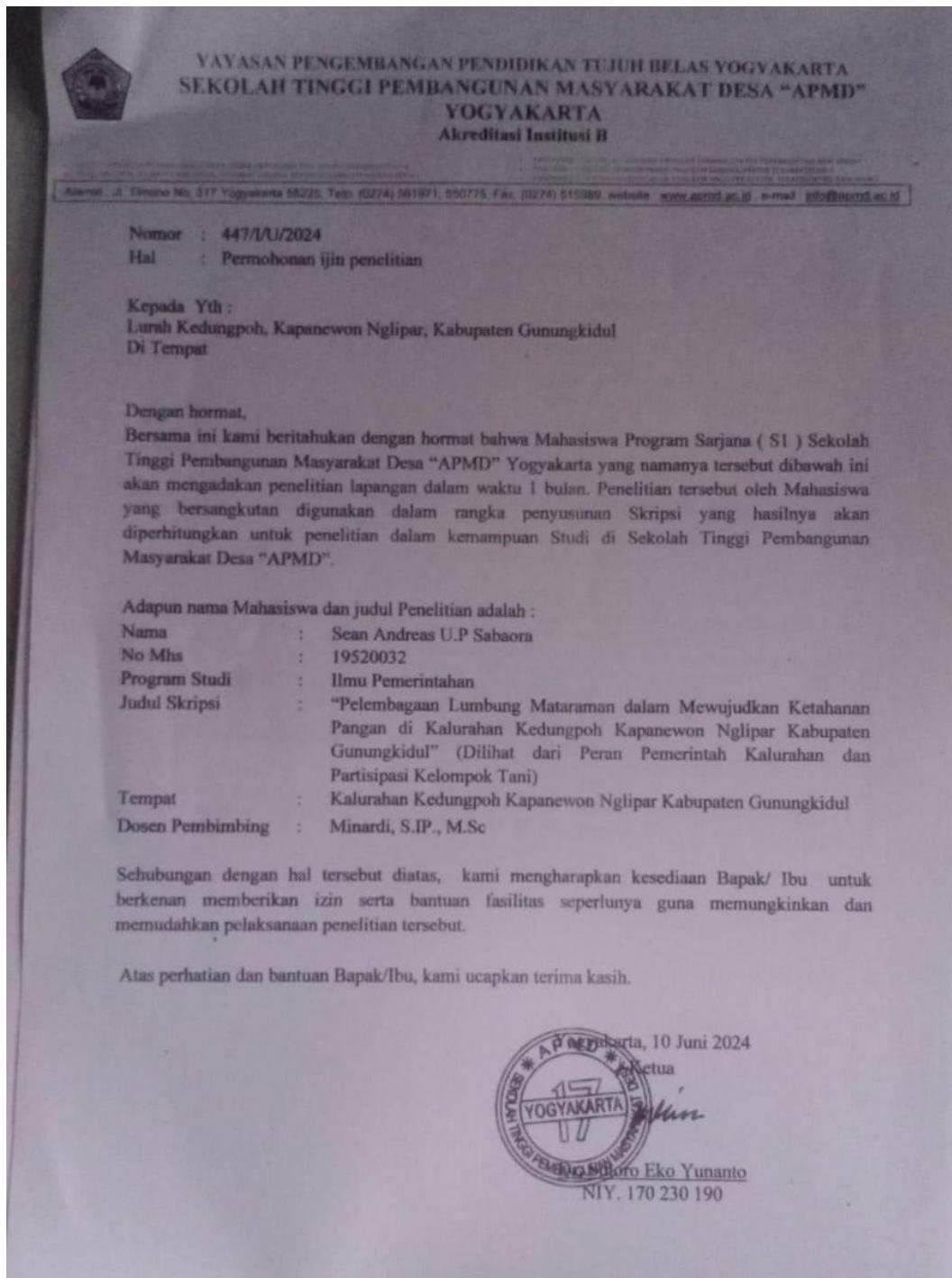
| | | |
|-------------------|---|--|
| Nama | : | Sean Andreas U.P Sabaora |
| No. Mahasiswa | : | 19520032 |
| Program Studi | : | Ilmu Pemerintahan |
| Tanggal Acc Judul | : | 5 April 2024 |
| Judul Proposal | : | Pelembagaan Lumbung Mataraman dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul |

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 4 April 2024



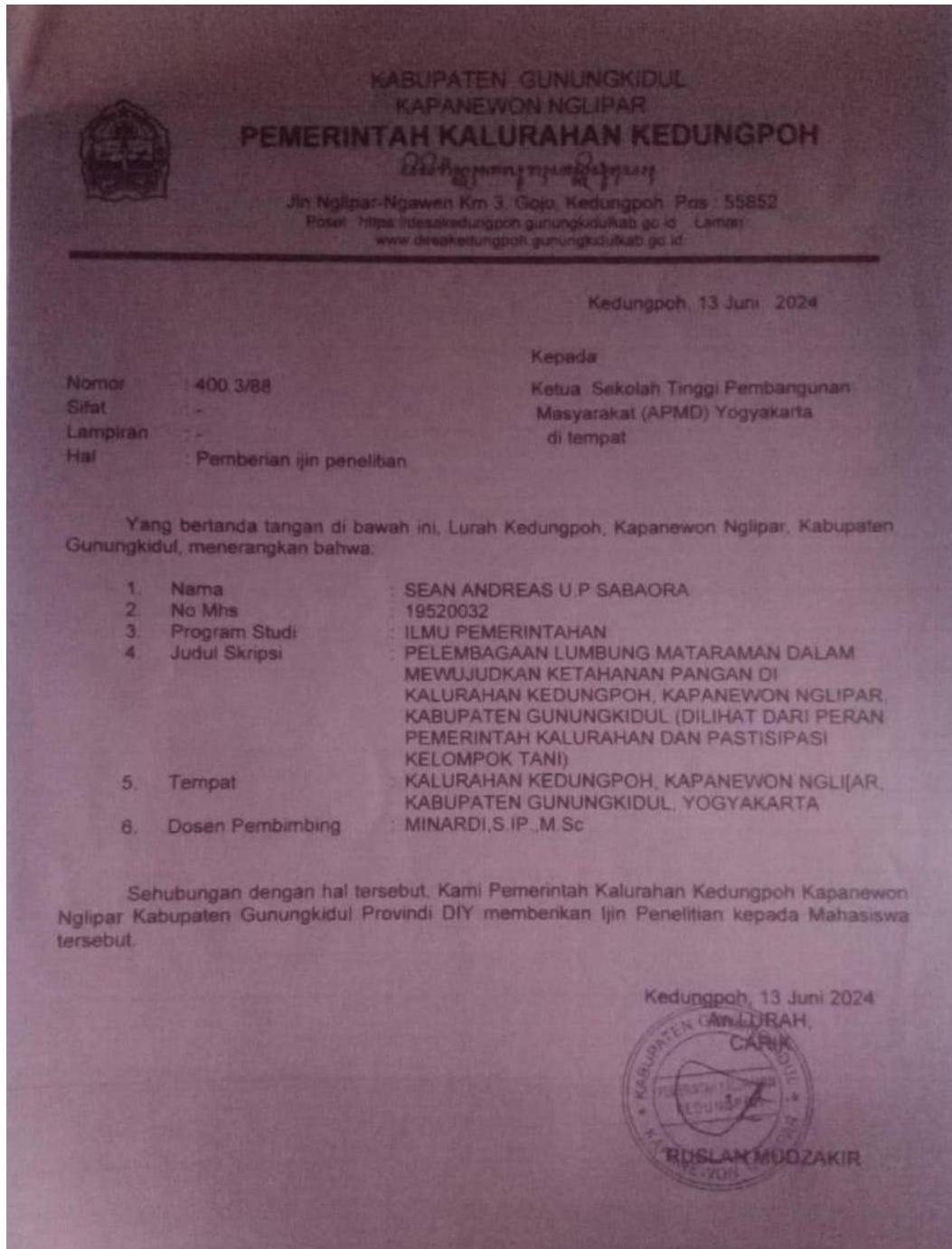
Surat Permohonan Ijin Penelitian



Surat Tugas Penelitian



Surat Pemberian Ijin Penelitian Kalurahan Kedungpoh



Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian



Dokumentasi Lapangan

Wawancara Carik



Wawancara Kaur Tata
Laksana/Pengelola Lumbung



Wawancara Ulu-Ulu/Pengelola
Lumbung



Wawancara Dukuh Nglorok/Pengelola
Lumbung



Wawancara Ketua KWT Mekar



Wawancara Ketua KWT Lantip Makarti



Tugu Lumbung Mataraman



Lahan Peranian Lumbung



Lahan Peranian Lumbung



Green House Lumbung



Kandang Ternak Sapi Lumbung



Green House Lumbung



Lahan Peranian Lumbung



Lahan Peranian Lumbung



Green House Lumbung



Green House Lumbung

